

**PEMIDANAAN KORPORASI TERHADAP KETIDAKMAMPUAN  
MEMBAYAR UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh**

**Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RIZKA ANANDA PONTY WIJATI**

**NIM. 145010107111111**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

## HALAMAN PENGESAHAN

### SKRIPSI

#### PEMIDANAAN KORPORASI TERHADAP KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI

RIZKA ANANDA PONTY WIJATI

NIM : 145010107111111

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 11 Juli 2018 dan disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum

Dr. Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 195901261987011002

NIP. 196607101992032003

Mengetahui,

Ketua Bagian

Dekan Fakultas Hukum

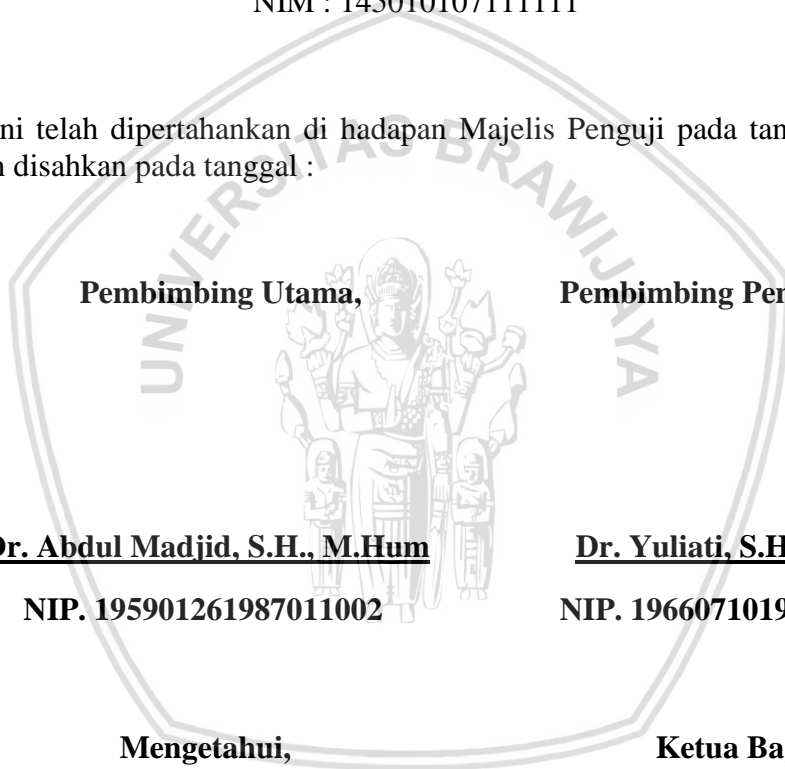
Hukum Pidana

Dr. Rachmad Safa'at, S.H., M.Si.

Dr. Yuliati, S.H., LL.M

NIP. 196208051988021001

NIP. 196607101992032003



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, Juni 2018

Yang Menyatakan,

Rizka Ananda Ponty Wijiati

145010107111111



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Data Pribadi

1. Nama : Rizka Ananda Ponty Wijiati
2. Tempat, Tanggal Lahir: Jombang, 25 September 1996
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Agama : Islam
6. Alamat : Sanan Timur Nomor 113, RT/RW 005/004,  
Ds. Mojotrisno, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang
7. Telp/Hp : 081232810907
8. E-mail : [Rizkaananda\\_pewe@yahoo.com](mailto:Rizkaananda_pewe@yahoo.com)

### II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2002-2008 : SD Negeri Mojotrisno
2. Tahun 2008-2011 : SMP Negeri 1 Mojoagung
3. Tahun 2011-2014 : SMA Negeri Mojoagung
4. Tahun 2014-2018 : Program S1 Hukum di Universitas Brawijaya

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Juli 2018

Rizka Ananda Ponty Wijiati

## ABSTRAK

Pembayaran uang pengganti dibebankan oleh korporasi karena telah terbukti pengurus secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan korporasi. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pun telah mendukung pembebanan uang pengganti terhadap korporasi apabila telah terbukti korporasi yang diuntungkan dari perbuatan melawan hukum tersebut. Namun, ditemukan bahwa korporasi tidak mampu bertanggungjawab atas kewajiban membayar uang pengganti.

Pembebanan untuk melaksanakan membayar ppidanaan uang pengganti nyatanya tidak dapat menjerat korporasi dan upaya untuk mengembalikan kerugian keungan negara dinilai belum maksimal. Dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ppidanaan korporasi terhadap pembayaran uang pengganti tindak pidana korupsi hanya mengatur secara teknis pembayarannya tanpa didukung norma dan upaya lain untuk membuat korporasi mendapatkan efek jera dan kontributif mampu bertanggungjawab membayar uang pengganti tindak pidana korupsi.

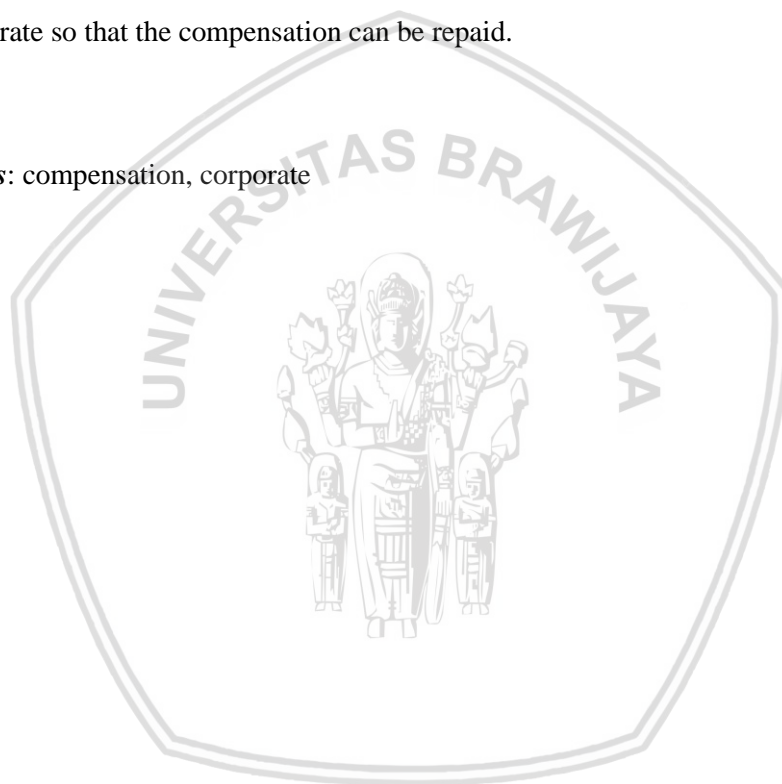
**Kata Kunci : Uang Pengganti, Korupsi, Korporasi**

## ABSTRACT

Compensation is imposed on corporate as it was proven there was corruption done collectively by a group of people for the sake of personal and corporate interests. The legislation is also in line with the case of financial compensation by the corporate when the corporate is proven doing a tort. However, it was found out that the corporate was not capable of paying the compensation.

Imposing compensation on corporate does not provide optimal solution to pay back the state loss. It is revealed that corporate crime is only regulated based on the compensation that has to be paid without any norms or other measures that may give deterring effect to the corporate so that the compensation can be repaid.

**Keywords:** compensation, corporate



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Dr. Yuliati, SH.,LL.M selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Bapak Dr. Abdul Madjid, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, dan motivasi.
4. Ibu Dr. Yuliati, SH.,LL.M selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan, kesabaran, dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua serta Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan selalu mendoakan tanpa lelah agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas segala perhatian dan bantuan, terutama doa. Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dan mempermudah segala urusannya.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Serta penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya pembaca.

Malang, Juni 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
DAFTAR BAGAN .....	vii
DAFTAR SKEMA .....	viii
RINGKASAN .....	ix
SUMMARY .....	x

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Sistematika Penulisan .....	18

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi .....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korporasi .....	28
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana .....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Uang Pengganti .....	36

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	39
B. Pendekatan Penelitian .....	39
C. Jenis dan Bahan Hukum .....	40
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	42
E. Teknik Analisa Bahan Hukum .....	43
F. Definisi Konseptual .....	44



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Pengaturan Uang Pengganti yang Tidak Dapat Dibayarkan oleh Korporasi ditinjau dari Unsur Kerugian Keuangan Negara .....	45
1. Posisi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	45
2. Kedudukan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan .....	47
3. Instrumen Hukum Pembayaran Uang Pengganti .....	53
4. Ketidakmampuan Membayar Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi .....	65
5. Unsur Kerugian Keuangan Negara pada Hakikat Tindak Pidana Korupsi .....	72
B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi .....	80
1. Kualifikasi Strategi dan Teknik Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi .....	80
2. Kesesuaian Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi .....	84
a. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana .....	84
b. Aliran Pertanggungjawaban Pidana .....	85
c. Teori Pertanggungjawaban Pidana .....	91
d. Sistem Kedudukan Pertanggungjawaban Pidana .....	93
3. Penentuan Sistem Pemidanaan Korporasi pada Uang Pengganti .....	94

## BAB V PENUTUP

A. Simpulan .....	103
B. Saran .....	104

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian .....	12
Tabel 2 Perbedaan Alur Pembayaran Uang Pengganti antara Perma Uang Pengganti dan Perma Tindak Pidana oleh Korporasi .....	62
Tabel 3 Kelemahan Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi .....	67



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Pembayaran Uang Pengganti bagi Terpidana Perseorangan .....	55
Bagan 2 Alur Pembayaran Uang Pengganti bagi Korporasi .....	58



## DAFTAR SKEMA

Skema 1 Rincian Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Mengatur Aspek: Bentuk, Objek, dan Kegiatan Keuangan Negara) .....	74
Skema 2 Keuangan Negara sebagai Ranah Pengaturan Hukum Pidana .....	78



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Ketetapan negara Indonesia adalah negara hukum,<sup>1</sup> norma ini bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan.<sup>2</sup> Penegakan hukum didukung dengan adanya kepentingan tersendiri yang memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk menyelaraskan kehidupan bermasyarakat.

Bentuk kemajuan suatu negara dapat dilihat dari pola pikir dan perilaku bangsa itu sendiri, dengan salah satunya meninjau dari kesehatan perekonomian negara tersebut. Dalam artian masyarakat memiliki aspek kesejahteraan yang memadai dalam berkehidupan sehari-hari. Disisi lain, perilaku buruk korupsi perlahan mencuri kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik

---

<sup>1</sup> Ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUDNRI 1945)

<sup>2</sup> Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), 1

dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>3</sup> Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu<sup>4</sup> (1) Seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut, (2) Adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut, dan (3) Sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.<sup>5</sup> Undang-undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor).

Perbuatan korupsi tidak hanya dilakukan oleh subjek hukum perseorangan, melainkan dapat pula dilakukan oleh subjek hukum korporasi (badan hukum). Beberapa keuntungan menentukan korporasi dijadikan sebagai subjek hukum karena seiring dengan meningkatnya peran korporasi dalam lalu lintas transaksi keuangan dan perdagangan di Indonesia dan diterimanya doktrin yang mengatakan korporasi dapat dimasukkan dalam *functioneel daderschap*<sup>6</sup> maka

---

<sup>3</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 6

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 6-7

<sup>5</sup> Ibid., hlm. 7

<sup>6</sup> Teori *functional daderschap* menjelaskan bahwa korporasi memiliki fungsi-fungsi, seperti fungsi pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa dalam mengembangkan perekonomian suatu negara. Merujuk penjelasan pada buku Hutaauruk, Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 22

korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana. Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum diikuti dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Indonesia dan negara-negara yang tergabung dalam G-20<sup>7</sup> telah membahas upaya peningkatan kerjasama penanganan kasus korupsi. Indonesia juga telah meratifikasi pengaturan korupsi secara internasional yang diatur dalam *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 dan disahkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi Tahun 2003 (selanjutnya disebut dengan UNCAC) sebagai bukti Indonesia adalah bagian dari gerakan global melawan korupsi.

Aturan pidana terhadap korporasi memang memiliki sedikit perbedaan dengan pidana perseorangan. Salah satunya terdapat dalam pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Bila terpidana perseorangan dapat “mengganti” pidana denda dengan pidana kurungan dan pembayaran uang pengganti dengan pidana penjara, berbeda halnya dengan terpidana korporasi. Ketentuan KUHP mengatur adanya pidana pokok dan pidana tambahan yang juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak hanya KUHP, seperti halnya pada

---

<sup>7</sup> G-20 atau *Group of Twenty* dibangun sebagai terobosan baru dalam kerjasama multilateralisme. Jumlahnya yang 20 dipandang signifikan dan sistematis. Keduapuluh anggota secara keseluruhan menguasai 80 persen lebih perekonomian dunia yang ditandai dengan penguasaan aliran investasi asing, pasar, perdagangan dunia, dan populasi dunia. Asumsi yang diyakini adalah bahwa perekonomian keduapuluh negara ini sehat, maka akan sehat pula perekonomian di seluruh dunia. Sehingga, keberhasilan forum ini akan membawa dampak sistematis yang signifikan bagi negara-negara dan entitas ekonomi dunia yang saat ini tidak menjadi anggota G-20. Pertumbuhan ekonomi di keduapuluh anggota ini akan membawa pertumbuhan yang stabil di negara-negara lain. Negara-negara yang termasuk anggota G-20 ialah Amerika Serikat, Afrika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, China, India, Inggris, Indonesia, Italia, Jerman, Kanada, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Turki, Perancis, Rusia, dan Uni Eropa. Merujuk penjelasan pada buku Tim Riset G-20, *Peran Indonesia dalam G-20: Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia*, (Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2011), iv

UU Tipikor diatur juga mengenai lainnya selain bentuk-bentuk pidana tambahan yang tercantum dalam KUHP. Disamping itu, ada pula Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi untuk memidanakan korporasi dan ketentuan pidana tambahan. Pidana tambahan menurut Perma Nomor 13 Tahun 2016 terdiri dari uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi.

UU Tipikor dan Perma Nomor 13 Tahun 2016 mengenal adanya uang pengganti dalam pidana tambahan yang dapat diterapkan disamping adanya pidana pokok. Namun, pada Perma Nomor 13 Tahun 2016 tersebut hanya mengatur secara teknis tanpa mengatur adanya norma yang mendukung. Uang pengganti merupakan jumlah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi korporasi. Menurut Salman Mariadi yang dikutip dalam jurnal Kristwan Genova, menjelaskan bahwa uang pengganti adalah uang yang harus dibayar oleh orang yang menikmatinya dan sifatnya hanya penggantian atas apa yang telah dipergunakannya, sehingga tidak dikenal istilah “renteng” dalam pembayaran uang pengganti.<sup>8</sup> Pada pelaksanaan tindak pidana korupsi pasti adanya sifat dan unsur-unsur merugikan keuangan negara.

Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi mengidentifikasi sejumlah kesalahan korporasi baik berbentuk kesengajaan maupun karena kelalaian. Selanjutnya, aset korporasi

---

<sup>8</sup> Damanik, Kristwan Genova, *Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No 1, Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Maluku Utara, (2016): 5



yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan. Ketentuan ini tidak saja menguntungkan penyidik atau jaksa penuntut umum dalam mengelola barang sitaan tapi juga menyelamatkan tersangka atau terdakwa dari risiko kerugian karena penurunan nilai ekonomis dari barang yang digunakan sebagai jaminan pembayaran uang pengganti.

Terlihat bahwa pembayaran uang pengganti menjadi hal yang sepele atau mudah untuk dibayarkan karena pelakunya sendiri sebagian besar adalah koruptor yang berlatarbelakang memiliki jabatan tinggi, sehingga disamping melakukan korupsi yang besar juga memiliki harta kekayaan sendiri yang tidak kalah banyak. Apalagi pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi yang memiliki aset dan keuntungan yang besar dalam bidang perekonomian. Ada beberapa kasus dimana korporasi melakukan tindak pidana korupsi, dalam putusan akhir Hakim memberikan putusan pidana tambahan berupa uang pengganti disamping pidana pokok. Namun, korporasi tidak mampu untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dibebankan oleh Hakim atas perbuatannya melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Hal ini nampaknya penagihan uang pengganti oleh aparat penegak hukum bukan sesuatu yang mudah.

Adapun contoh kasus korupsi Gardu Induk PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang dilakukan oleh direktur dan pemilik PT. Arya Sada Perkasa, yaitu Egon Chairul Arifin beserta manager PT. Arya Sada Perkasa, yaitu Tanggul

Priamandaru, telah terbukti dan dinyatakan bersalah oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta 06/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaku telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama". Dalam kasus ini, menyangkut-pautkan korporasi PT. Arya Sada Perkasa karena para pelaku memberikan keuntungan kepada korporasi tersebut dengan cara merugikan keuangan negara. Sehingga, disamping penjatuhan pidana pokok terhadap pelaku, pidana tambahan yang berupa uang pengganti dijatuhkan kepada korporasi atau pihak perusahaan yang diuntungkan dari akibat perbuatan pidana korupsi. Namun, ada celah dimana kewajiban pembayaran uang pengganti tidak segera dibayarkan oleh korporasi, padahal dalam peraturan perundang-undangan telah mengatur jangka waktu pembayaran uang pengganti.

Kasus korupsi yang dilakukan oleh korporasi, yaitu PT Arya Sada Perkasa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan memenangkan beberapa proyek pembangunan Gardu Induk (GI) milik PLN, meliputi GI 1500 KV New Sanur Bali dengan nilai kontrak Rp 35.994.290.979,- ( $\pm$  tiga puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah) dan GI 150 KV Cilegon Baru II dengan nilai kontrak Rp 49.923.824.299,- ( $\pm$  empat puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah). Dari beberapa proyek itu, kegiatan pembangunan GI New Sanur Bali bermasalah dalam hal pengadaan lahan, sehingga diusut oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian kasusnya dilimpahkan pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan diputus oleh pihak

Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juni 2016 lalu.<sup>9</sup> Pada beberapa proyek tersebut, hanya kegiatan pembangunan GI New Sanur Bali yang bermasalah khususnya dalam hal pengadaan lahan, sehingga diusut oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang kemudian kasusnya dilimpahkan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan diputus oleh pihak Pengadilan Tipikor Jakarta pada Juni 2016 lalu. Dalam putusan pengadilan PT Arya Sada Perkasa diperintahkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 8.972.553.019,- ( $\pm$  delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka aset PT Arya Sada Perkasa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun, hingga saat Egon Chairul Arifin telah bebas pada agustus 2017 karena mendapatkan remisi penahanan, uang pengganti yang harus dibayarkan oleh korporasi yang dinaunginya tidak kunjung dibayar sampai tahun 2018 ini.

Melihat ketidakmampuan korporasi dalam melakukan pembayaran terhadap uang pengganti, setelah putusan berkekuatan hukum tetap Jaksa melakukan penyitaan atas sejumlah peralatan GI New Sanur Bali dari PT. PLN yang disediakan oleh PT. Arya Sada Perkasa. Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur adanya jangka waktu untuk dilakukan penyitaan dan pelelangan setelah korporasi terbukti tidak dapat membayar sejumlah uang

---

<sup>9</sup> Budi, Setiawan. *Tak Kunjung Bayar Uang Pengganti, PT Aryasa Dilaporkan ke Komisi III DPR-RI*. <https://amunisinews.co.id/tak-kunjung-bayar-uang-pengganti-pt-aryasa-dilaporkan-ke-komisi-iii-dpr-ri/> (Diakses pada 22 Maret 2018)

pengganti yang telah ditetapkan.<sup>10</sup> Peraturan perundang-undangan juga memberikan perpanjangan dalam hal terdapat alasan kuat korporasi tidak mampu membayar uang pengganti, hingga akhirnya dilakukan penyitaan yang kemudian dilanjutkan dengan pelelangan. Namun, pada tahun 2017 ditemukan informasi bahwa PT. Arya Sada Perkasa masih belum melunasi uang pengganti dan barang hasil penyitaan milik perusahaan tersebut hangus terbakar. Sehingga, dapat dipastikan barang sitaan milik perusahaan tersebut yang ditujukan untuk membayar uang pengganti tidak dapat dilakukan pelelangan. Jika merujuk pada ketentuan perundang-undangan, batas waktu dilakukan pelelangan oleh pihak Kejaksaan telah habis, namun hingga tahun 2018 masih belum ada kejelasan mengenai eksekusi barang sitaan sebagai ganti untuk membayar uang pengganti yang hingga melebihi jangka waktu belum juga terbayarkan.

Menurut ketua Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran (BPIKPNPA), masih banyak aset dari PT. Arya Sada Perkasa, yaitu dana dari hasil pekerjaan GI Cilegon Baru II yang masih tertahan di PLN sebesar kurang lebih Rp 9.500.000.000,- (sembilan miliar lima ratus juta rupiah) dan itu bisa disita oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai uang pengganti kerugian negara yang ada, dan informasi itu diketahui dari mantan manager PT. Arya Sada Perkasa, yaitu Ir. Tanggul yang kini masih berada di tahanan Lapas Sukamiskin karena tersandera oleh uang pengganti yang

---

<sup>10</sup> Anonim, *PLN Diminta Cairkan Uang Pengganti Kerugian Negara oleh BPI KPNPA Jabar*. <https://m.harianterbit.com/welcome/read/2017/10/28/88813/43/25/PLN-Diminta-Cairkan-Uang-Pengganti-Kerugian-Negara-oleh-BPI-KPNPA-Jabar-> (Diakses pada 9 Februari 2018)

belum dibayarkan oleh Egon Arifin selaku Direktur PT Arya Sada Perkasa yang kini sudah bebas dari tahanan.<sup>11</sup> Penuturan informasi ini dilakukan pada tahun 2017 dan hingga tahun 2018 belum ada kejelasan mengenai penyitaan lebih lanjut lagi oleh Kejaksaan.

Tujuan diterapkannya pidana pembayaran uang pengganti ialah melakukan pemidanaan dengan seberat mungkin terhadap para koruptor agar memiliki efek jera serta dalam rangka mengembalikan keuangan negara yang lenyap sia-sia akibat suatu tindak pidana korupsi. Tidak hanya pelaku perorangan yang dapat dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti, badan hukum atau korporasi sangat dimungkinkan memperoleh hukuman membayar uang pengganti atas perbuatan yang menguntungkan perusahaan dengan cara ilegal, khususnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Pengenaan besaran uang pengganti sendiri dalam peraturan perundang-undangan tidak disebutkan secara rinci, namun ada pertimbangan atau faktor terhadap penjatuhan pidana uang pengganti dengan penggolongan pelaku sendiri. Sehingga, tidak hanya dilihat seberapa besar jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, namun juga profil koruptor dipertimbangkan agar pemberian pidana uang tambahan dapat diterapkan dengan adil dan tidak mencederai tujuan hukum itu sendiri.

Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti tidak dikenal dalam ketentuan mengenai pidana tambahan dalam KUHP. Umumnya pidana yang

---

<sup>11</sup> Ismanto, *BPI KPNPA Jabar Minta PLN Cairkan Dana PT Aryasada untuk Uang Pengganti Kerugian Negara*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/26/lsm-bpi-kpnpa-jabar-minta-pln-cairkan-dana-pt-aryasada-untuk-uang-pengganti-kerugian-negara> (Diakses pada 9 Februari 2018)

dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang harta benda adalah pidana penjara atau pidana denda.<sup>12</sup> Perbuatan merugikan keuangan negara sebagai perbuatan pidana, prinsip yang menjadi ukuran adalah adanya perbuatan formal melanggar hukum dan adanya akibat materiil terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti, dapat dihitung dengan nilai uang.<sup>13</sup> Secara tertulis, pada UU Tipikor tidak menjelaskan ada atau tidaknya keterkaitan uang pengganti dengan unsur kerugian keuangan negara. Serta Perma Nomor 13 Tahun 2016 sendiri hanya mengatur secara teknis, sedangkan norma tidak diatur dengan jelas. Tidak berbeda halnya dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, pada Perma ini pun tidak dijelaskan pengertian uang pengganti hanya menyebutkan bahwa penentuan jumlah uang pengganti bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara, hal ini dapat menjadi rancu karena salah satu faktor tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Pembayaran uang pengganti juga harus diikuti dengan kemampuan korporasi untuk membayar agar tidak menjadi kendala dalam eksekusi pemidanaan. Akan menjadi hambatan apabila korporasi tidak mampu membayar uang pengganti yang dilatarbelakangi oleh beberapa faktor baik karena korporasi tidak kooperatif atau memang ditemukan adanya permasalahan

---

<sup>12</sup> Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 58-59

<sup>13</sup> Makawimbang, Hernold Ferry. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 63

sehingga menyebabkan korporasi tidak mampu untuk membayar uang pengganti yang menjadi kewajibannya.

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul **PEMIDANAAN KORPORASI TERHADAP KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI.**





**TABEL 1**  
**ORISINALITAS PENELITIAN**

<b>No</b>	<b>Tahunm. Penelitian</b>	<b>Nama Peneliti dan Asal Instansi</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	2017	Anizar Ayu Pratiwi, Universitas Lampung	Analisis Penjatuhan Subsider Pidana Pengganti oleh Hakim Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tinggi Tanjungkarang)	1. Bagaimanakah praktik penjatuhan subsider pidana uang pengganti oleh hakim tindak pidana korupsi pada tingkat banding? 2. Apakah faktor hambatan dalam penjatuhan subsider pidana uang	Perbedaan penulisan penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya adalah melakukan pengkajian mengenai penentuan jumlah uang pengganti dan penjatuhan subsider pidana yang tidak berimbang, serta menimbulkan asumsi masyarakat bahwa penetapan uang pengganti dan subsider pidana uang



				pengganti pada tindak pidana korupsi ?	pengganti oleh hakim tidak memenuhi rasa keadilan.
2.	2013	Ganesa Adi Nugraha, Universitas Negeri Semarang	Eksistensi Pidana Tambahkan Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)	1. Bagaimana pengaruh yang timbul dengan adanya eksekusi pidana tambahan yang dilaksanakan oleh jaksa bagi pelaku tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Semarang ?  2. Bagaimana proses perampasan harta benda	Perbedaan penulisan penelitian yang ditulis oleh peneliti sebelumnya adalah melakukan pengkajian mengenai adanya pengaruh yang timbul terkait pidana tambahan, yaitu uang pengganti yang belum memiliki efek jera dan proses pelaksanaan khususnya perampasan harta benda milik pelaku tindak pidana

				bagi pelaku tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Semarang?	korupsi tidak efektif.
3.	2013	Fuad Akbar Yamin, Universitas Hasanuddin	Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti untuk Pengembalian Kerugian negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi	1. Bagaimanakah mekanisme pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi? 2. Kendala apakah yang dihadapi	Perbedaan penulisan penelitian dengan peneliti sebelumnya adalah melakukan pengkajian mengenai mekanisme pembayaran uang pengganti sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab

				dalam proses pembayaran uang pengganti untuk pengembalian kerugian keuangan negara dalam kasus tindak pidana korupsi?	beserta kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran uang pengganti.
--	--	--	--	---	---

Demikian merupakan perbandingan penulisan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan dengan menunjukkan perbedaan dari setiap penelitian. Meskipun, khususnya pada penelitian milik peneliti ke-tiga, yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti untuk Pengembalian Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi terdapat persamaan yang meliputi aspek tanggungjawab pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dilaksanakan oleh para penanggungjawab sebagai bentuk pengembalian kerugian keuangan negara, namun memiliki batasan perbedaan yang ditulis oleh penulis dengan peneliti tersebut adalah subjek yang bertanggungjawab adalah korporasi yang

tidak mampu untuk membayar uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan oleh korporasi ditinjau dari unsur kerugian keuangan negara ?
2. Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban korporasi atas ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi di Indonesia?

## **C. Tujuan**

1. Merumuskan dan menganalisis pengaturan uang pengganti yang tidak dapat dibayarkan oleh korporasi ditinjau dari unsur kerugian keuangan negara.
2. Merumuskan dan menganalisis pertanggungjawaban korporasi atas ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi serta memberikan manfaat bagi perkembangan keilmuan khususnya bidang ilmu

hukum pidana materiil, serta meliputi bidang tindak pidana korupsi, bidang korporasi, dan mengenai pengaturan pembayaran uang pengganti bagi para penanggungjawab yang merugikan keuangan negara bertujuan menguntungkan korporasi dalam peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan fenomena yang ada di masyarakat.

## 2. Manfaat Praktis

### 2.1 Bagi Mahasiswa

Sebagai pemahaman yang lebih mendalam dan rinci tentang pembedaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi yang dapat ditinjau dari fenomena kasus yang ada di masyarakat yang menimbulkan kesenjangan peraturan perundang-undangan mengenai uang pengganti di Indonesia tidak efektif atau terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

### 2.2 Bagi Penegak Hukum

Sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi penegak hukum untuk mewujudkan terlaksananya peraturan perundang-undangan yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien khususnya mengenai pembedaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti.

### 2.3 Bagi Akademisi

Sebagai penunjang tambahan alternatif, referensi materi perkuliahan, dan menjadi penyempurnaan kurikulum pembelajaran khususnya dalam bidang ilmu hukum agar tercipta efektif dan efisien.

## 2.4 Bagi Masyarakat

Sebagai pengetahuan dan kontrol sosial mengenai pemicanaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi serta mencegah menimbulkan niat masyarakat untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

### E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam sistematika yang terbagi dalam 5 (lima) BAB untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan yang diteliti. Adapun urutan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasan sebagai berikut.

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang berisi tentang alasan yang mendasari dilakukan penelitian, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan dilaksanakannya penelitian, dan manfaat secara praktis dan teoritis dilaksanakannya penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan umum yang di dalamnya terkandung sub pokok-pokok bahasan yang membahas argumentasi ahli, teori, doktrin mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, pemicanaan korporasi, definisi dari korupsi khususnya tindak pidana korupsi, asas-asas berlakunya hukum pidana Indonesia, ilmu hukum pidana dan hukum pidana korupsi serta pengaturannya di Indonesia.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai metode yang dipakai dalam melaksanakan penelitian. Pada bab ini terbagi menjadi metode pendekatan, jenis penelitian, jenis bahan hukum teknik pengumpulan bahan hukum dan teknik analisis bahan hukum.

### **BAB,IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab IV penulisan penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai bagaimana pemidanaan korporasi secara efektif terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab terakhir ini dijelaskan tentang kesimpulan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan tentang pemidanaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi.

Serta saran peneliti bagi struktur penegak hukum pidana agar penelitian ini bermanfaat ke depannya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Adreae yang dikutip dalam buku Ermansjah Djaja, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere* suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie* (*korruptie*), dapat atau patut diduga istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>1</sup>

Menurut Kamus Umum Belanda Indonesia yang disusun oleh Wijowasito yang dikutip dalam buku Ermansjah Djaja, *corruptie* yang juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda mengandung arti perbuatan korup, penyuapan.<sup>2</sup> Menurut *The Lexicon Webster Dictionary* yang dikutip dalam buku Ermansjah Djaja, kata korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), 23

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Ibid., 23-24



Pengertian korupsi menurut Gurnar Myrdal yang dikutip dalam buku Ermansjah Djaja adalah :<sup>4</sup>

*To include not only all forms of improper risefish exercise of power and influence attached to a public office or the special position one occupise in the public life but also the activity of the bribers.*

Terjemahan bebas :

Korupsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak patut yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas-aktivitas pemerintahan atau usaha-usaha tertentu untuk memperoleh kedudukan secara tidak patut, serta kegiatan lainnya, seperti penyogokan.

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam pembendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta yang dikutip dalam buku Ermansjah Djaja bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.<sup>5</sup> Dalam hukum positif anti korupsi khususnya dalam Pasal 1 angka 1 Bab Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 disebutkan tentang pengertian tindak pidana korupsi.<sup>6</sup>

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh

---

<sup>4</sup> Djaja, Ermansjah. Op.cit. 24

<sup>5</sup> Ibid., hlm 25

<sup>6</sup> Pengertian tindak pidana korupsi yang ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1, sebagai berikut :

1. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Benveniste yang dikutip dalam buku Suyatno, korupsi didefinisikan menjadi 4 jenis, yaitu sebagai berikut.<sup>7</sup>

1. *Disrectionery Corruption*

Korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.

2. *Illegal Corruption*

Suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan, dan regulasi tertentu.

3. *Mercenary Corruption*

Jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.<sup>8</sup>

4. *Ideological Corruption*

Jenis korupsi *illegal* maupun *disrectionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Terdapat ratusan, bahkan ribuan jenis tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi. Tindakan-tindakan tersebut dapat dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu *grand corruption* (korupsi besar) dan *petty corruption* (korupsi kecil). Tidak ada landasan teori yang pasti sebagai dasar penggolongan tersebut, tetapi prinsip yang dapat dijadikan acuan adalah besaran dan modus

---

<sup>7</sup> Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 17

<sup>8</sup> Ibid.,

operandi, serta level pejabat publik yang terlibat didalamnya.<sup>9</sup> *Grand corruption* mengacu pada korupsi yang dilakukan oleh kepala negara, menteri, dan pejabat tingkat atas dan biasanya ditandai dengan jumlah kerugian yang besar.<sup>10</sup> Modus operandi yang umum terjadi adalah kolusi antara kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan para pengambil kebijakan publik. Melalui pengaruh yang dimiliki kelompok kepentingan tertentu mempengaruhi pengambil kebijakan guna mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan kelompoknya. Apabila pengaruh kelompok tersebut begitu besar dan seolah dapat mengontrol proses perumusan kebijakan publik, fenomena ini sering disebut dengan *state capture* atau *elited capture*.<sup>11</sup> Sedangkan, *petty corruption* adalah korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang dialami oleh orang-orang yang menggunakan layanan publik.<sup>12</sup> Korupsi kecil merupakan fenomena yang terjadi di banyak negara yang gagal menyusun dan mengimplementasikan kebijakan publik yang menyejahterakan rakyat. Kendati nilai kerugian per-kejadian relatif kecil, tetapi dikarenakan jumlah kejadian yang masif, total kerugian yang diderita oleh negara dan masyarakat akibat korupsi ini sangat besar.<sup>13</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

Apabila suatu hukum memungkinkan perbuatan manusia untuk menjadikan badan itu disamping manusia, yang mana ia disamakan maka itu berarti bahwa

---

<sup>9</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie. Op.cit. 17

<sup>10</sup> Yazid, Ferdian. *Upaya Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Tinjauan dari Aspek Social Crime Prevention)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 44 Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, (2014): 18

<sup>11</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie. Loc.cit

<sup>12</sup> Yazid, Ferdian. Loc.cit

<sup>13</sup> Wijayanto dan Ridwan Zachrie. Op.cit. hlm. 19

kepentingan masyarakat membutuhkannya, yakni untuk mencapai sesuatu yang oleh para individu tidak dapat dicapai atau amat susah untuk dicapai. Berdasarkan uraian tersebut, korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum.<sup>14</sup> Pengertian korporasi dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Buku I 2012 Pasal 182 yang menyatakan, Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.<sup>15</sup>

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun digunakan dalam rumusannya adalah setiap orang, namun dalam Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.<sup>16</sup> Pengertian korporasi dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1.<sup>17</sup>

Menurut Utrecht dan Soleh Djindang yang dikutip dalam buku Muladi dan Dwidja tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi merupakan badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-

---

24 <sup>14</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2015)

<sup>15</sup> Ibid., 32

<sup>16</sup> Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Op.cit. 82

<sup>17</sup> Pengertian korporasi yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1, sebagai berikut :

Kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

masing.<sup>18</sup> Korporasi sering pula disebut sebagai *legal entities* atau *rechtperson* dengan maksud untuk menjelaskan bahwa badan tersebut memiliki identitas hukum yang memiliki kekayaan serta hak dan kewajiban yang terpisah dari anggota-anggotanya. Secara umum terminologi korporasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut.<sup>19</sup>

1. Merupakan subjek hukum yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas;
3. Memperoleh kekuasaan dari negara untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4. Dimiliki oleh pemegang saham;
5. Tanggungjawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

Sebagaimana diketahui bahwa pada awalnya hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia belum mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana karena KUHP sebagai hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia hanya menentukan bahwa subjek hukum pidana adalah hanya orang pribadi (alami).<sup>20</sup> Asas *societas delinquere non potest*<sup>21</sup> inilah yang menjelaskan mengapa dalam KUHP tidak ditemukan tempat bagi korporasi sebagai suatu subjek hukum pidana karena korporasi dianggap tidak memiliki kemauan dan jiwa, yang karenanya tidak mungkin dianggap mampu melakukan suatu

---

<sup>18</sup> Ibid., 25

<sup>19</sup> Hutaeruk, Rufinus Hotmaulana. Op.cit. 19

<sup>20</sup> Ibid., 21

<sup>21</sup> Asas ini merupakan nama lain dari asas *universitas delinquere non potest*, yaitu asas hukum pidana yang menjelaskan bahwa badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana

perbuatan dan tidak mungkin memiliki kalbu atau kesalahan. Sangat bisa jadi pandangan ini diikuti oleh hukum acara pidana, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang hanya menempatkan orang atau manusia alamiah sebagai pihak yang bisa dituntut di hadapan pengadilan.<sup>22</sup>

Badan hukum biasa erat kaitannya dengan bidang hukum perdata, namun korporasi dalam hukum pidana lebih luas pengertiannya bila dibandingkan dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Sebab, korporasi dalam hukum pidana bisa berbentuk badan hukum atau non badan hukum, sedangkan menurut hukum perdata, korporasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum.<sup>23</sup> Menurut landasan atau dasar hukum di Indonesia dikenal dua macam badan hukum, yaitu badan hukum orisinil (murni, asli), yaitu negara, contohnya Negara Republik Indonesia, badan hukum yang tidak orisinil (tidak murni, tidak asli), yaitu badan-badan hukum yang berwujud sebagai perkumpulan.<sup>24</sup>

Menurut penggolongan hukum, yaitu golongan hukum publik dan hukum privat, aneka badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum publik dan badan hukum privat, sebagai berikut :<sup>25</sup>

#### a. Badan Hukum Publik

Badan hukum publik didirikan berdasarkan aturan hukum yang khusus mengaturnya baik melalui perundang-undangan ataupun penetapan

---

<sup>22</sup> Sjawie, Hasbullah. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kencana, 2015), 63-64

<sup>23</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno. Op.cit. 33

<sup>24</sup> Setiyono. Op.cit. 4

<sup>25</sup> Ibid., 5



pemerintah (*executive order*). Badan hukum publik dengan demikian merupakan badan hukum yang didirikan oleh Negara dan memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan publik yang mengikat secara umum atau masyarakat untuk mematuhi. Contoh nyata adalah negara, pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh badan hukum publik mengikat untuk dipatuhi oleh siapa yang terkena peraturan tersebut.<sup>26</sup>

b. Badan Hukum Privat

Badan hukum publik dapat mendirikan suatu badan hukum privat, misalnya Negara Republik Indonesia mendirikan yayasan-yayasan, PT-PT negara, dan sebagainya, bahkan daerah-daerah otonomi dapat mendirikan, seperti bank-bank daerah.<sup>27</sup> Eksistensi badan hukum privat yang meliputi syarat-syarat pendirian dan pembubaran, kewajiban pendiri dan pengurus serta hak-hak dan kewajiban yang melekat erat padanya, diatur dalam KUH Perdata (*Civil Code*) dan/atau KUH Dagang (*Commercial Code*) dan pengesahan sebagai badan hukum dilakukan melalui penetapan pemerintah. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa badan hukum privat atau badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan oleh masyarakat dan diakui oleh negara atau didirikan oleh negara melalui peraturan

---

<sup>26</sup> Ibrahim, Johnny, *Eksistensi Badan Hukum di Indonesia Sebagai Wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia*, *Law Review*, Volume 11, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya (2011): 113

<sup>27</sup> Setiyono. Op.cit. 5-6

perundang-undangan, tetapi tidak memiliki kewenangan menetapkan kebijakan publik. Beberapa contoh yang dapat dikemukakan disini adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Wakaf dan Partai Politik.<sup>28</sup>

Menurut Sutan Sjahdeini yang dikutip dalam jurnal Surya Sofyan Hadi, dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Disana, korporasi meliputi badan hukum maupun bukan badan hukum. Cakupannya bukan saja badan-badan hukum, seperti perseroan terbatas, yayasan, korporasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksud dengan korporasi.<sup>29</sup>

### C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Korporasi

Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, dimana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan. Pengertian kejahatan meliputi semua perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana

---

<sup>28</sup> Ibrahim, Jhonny. Loc.cit.

<sup>29</sup> Surya Sofyan Hadi dan Suhaidi dkk. *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dalam Kaitannya dengan Penerapan Hukum Lingkungan*, USU Law Journal, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2016): 64



perbuatan tersebut merugikan baik si korban sebagai pihak yang tidak secara langsung perbuatan tersebut, maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.<sup>30</sup> *Criminaloid* atau Kejahatan korporasi bukan menjadi hal baru yang dilakukan pelaku tindak pidana, tetapi kemasan, bentuk, dan perwujudannya yang memiliki pembaruan mengikuti perkembangan zaman. Mengutip pendapat Marshall B. Clinard dan Peter C. Yaeger dalam jurnal Yudi Krismen, kejahatan korporasi ialah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bias diberi hukuman oleh negara entah dibawah hukum administrasi negara, hukum perdata maupun hukum pidana.<sup>31</sup>

Adapun kejahatan korporasi itu adalah bagian dari *white collar crime*. Menurut Edwin H. Sutherland yang dikutip dalam buku Muladi dan Dwidja mendefinisikan *white collar crime* sebagai suatu pelanggaran hukum pidana yang dilakukan oleh orang yang memiliki status ekonomi sosial tinggi (*upper socio economic class*) dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaannya (*in course on his occupational activities*). Atau kejahatan yang dilakukan oleh orang berkerah putih/orang terhormat, apabila berbicara tentang kejahatan korporasi itu sendiri harus dibedakan antara lain :<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Muliadi, Saleh. *Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan*, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No 1, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, (2012): 5

<sup>31</sup> Krismen, Yudi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No 1, Pekanbaru, (2015): 155

<sup>32</sup> Muladi dan Dwidja Prayitno. *Op.cit.* 280-281

a. *Crimes for Corporation*

Merupakan kejahatan korporasi (*corporate crimes*) yang dapat dikatakan bahwa *corporate crimes are clearly committed for the corporate and not against*<sup>33</sup>.

b. *Crimes Against Corporation*

Sering dinamakan *employee crimes* atau kejahatan yang dilakukan oleh karyawan atau anggota korporasi.

c. *Criminal Corporation*

Korporasi yang sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Kejahatan korporasi yang menonjol sebagai dampak era globalisasi, sebagai berikut :<sup>34</sup>

a. *Price Fixing*, contohnya:

- i). *Predition*; para perusahaan raksasa melakukan persetujuan diantaranya mereka sendiri untuk menawarkan harga yang jauh di bawah harga pasar, tujuannya untuk melemahkan perusahaan-perusahaan kecil yang menjadi saingan. Jika saingan mereka sudah jatuh barulah mereka mulai menaikkan harga;
- ii). *Geographical Market Sharing*; para perusahaan membagi daerah-daerah pasar yang potensial ke dalam wilayah-wilayah yang memungkinkan salah satu anggota persekongkolan itu melakukan

<sup>33</sup> Terjemahan bebas :

Kejahatan korporasi yang terjaln untuk korporasi dan tidak bertentangan terhadap korporasi

<sup>34</sup> Ibid.,

penawaran harga yang rendah. Penawaran harga rendah itu dimungkinkan karena dalam satu wilayah tertentu hanya ada satu perusahaan yang menguasai;

- iii). *Rotational Bidding*; para perusahaan/korporasi melakukan persekongkolan melakukan sistem bergilir di antara para anggotanya untuk dapat memenangkan penawaran terhadap kontrak-kontrak bisnis ataupun kontrak dengan pemerintah, caranya mereka mengadakan koordinasi siapa-siapa yang harus memberikan penawaran yang luar biasa tingginya (sehingga gagal memenangkan kontrak) dan siapa yang dapat giliran memenangkan kontrak (dengan penawaran pantas);
- iv). *Identical Bidding*; para perusahaan memberikan penawaran yang identik untuk setiap bentuk kontrak, walaupun sebenarnya ia sanggup memberikan penawaran yang berbeda tujuannya untuk memastikan semua penjaga mendapatkan bagian dari pasar yang tersedia tanpa risiko kehilangan keuntungan.

b. *False Advertising* (Penipuan Iklan)

Bentuk penipuan yang paling serius terjadi di bidang obat-obatan (farmasi), hal ini dimungkinkan karena adanya perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang sejenis untuk membuat produk mereka laku, maka harus meyakinkan masyarakat bahwa produk mereka lebih unggul daripada produk-produk sejenis dari perusahaan lain.

### c. Kejahatan Lingkungan

Telah banyak perhatian diberikan kepada banyak korporasi yang melalaikan pelestarian lingkungan dengan menimbulkan polusi bagi lingkungan akibat kegiatan proses produksi mereka.

Bentuk tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh korporasi sangat beraneka ragam, bisa meliputi bidang ekonomi, bidang sosial budaya dan masyarakat luas. Di bidang ekonomi, menurut Joseph F. Sheley yang dikutip dalam jurnal Bambang Ali Kusumo, bentuk tindak pidana korporasi adalah sebagai berikut :<sup>35</sup>

- 1). *Defrauding Stockholders*, yaitu menggelapkan atau menipu pemegang saham (misalnya tidak melaporkan dengan sebenarnya keuntungan perusahaan);
- 2). *Defrauding The Public*, yaitu menipu masyarakat atau publik (misalnya penentuan harga dan produk-produk yang tidak representatif atau iklan yang menyesatkan);
- 3). *Defrauding The Government*, yaitu menipu pemerintah (misalnya menghindari pajak);
- 4). *Endangering The Public Welfare*, yaitu membahayakan kesejahteraan umum (misalnya menimbulkan polusi industri);
- 5). *Endangering Employees*, yaitu membahayakan pekerja (misalnya tidak mempedulikan keselamatan kerja).

---

<sup>35</sup> Kusumo, Bambang Ali. *Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, (2005): 102

#### D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban terhadap suatu tindak pidana merupakan suatu proses dilanjutkannya celaan (*verwijtbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana oleh hukum pidana dan si pelaku merupakan subjek hukum yang dianggap memenuhi persyaratan untuk dijatuhi pidana.<sup>36</sup> Menurut Peter Gillies yang dikutip dalam buku Rufinus, mengatakan bahwa korporasi atau perusahaan adalah orang atau manusia di mata hukum, dan karenanya mampu melakukan sesuatu sebagaimana yang dilakukan manusia, diakui oleh hukum seperti kekayaan, dapat melakukan kontrak, sehingga seharusnya harus dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>37</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip dalam buku Mahrus Ali, mengatakan bahwa dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu :<sup>38</sup>

- 1). Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab

Ditandai dengan usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan (*naturlijk persoon*), sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan pengurus korporasi itu. Pengurus-

---

<sup>36</sup> Hutaeruk, Rufinus Hotmaulana. Op.cit. 47

<sup>37</sup> Ibid.,

<sup>38</sup> Ali, Mahrus. Op.cit. 47

pengurus yang tidak memenuhi kewajiban yang sebenarnya merupakan kewajiban korporasi dapat dinyatakan bertanggungjawab.<sup>39</sup>

2). Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab

Ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi). Dalam pertanggungjawaban ini korporasi dapat menjadi pembuat tindak pidana, akan tetapi yang bertanggungjawab adalah para anggota pengurus, asal saja dinyatakan dengan tegas dalam peraturan.<sup>40</sup>

3). Korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab

Ditandai dengan adanya menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana dalam ketentuan hal-hal yang dapat dipakai sebagai dasar pembeda dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan sekaligus yang bertanggungjawab adalah, dalam berbagai delik-delik ekonomi dan fiskal keuntungan yang dipakai korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat dapat demikian besarnya, sehingga tidak akan mungkin seimbang bilamana pidana hanya dijatuhkan kepada pengurus korporasi saja. Dengan memidana korporasi dengan jenis dan beratnya sesuai dengan sifat

---

<sup>39</sup> Ibid., 47-48

<sup>40</sup> Ibid., 48

korporasi itu, diharapkan dapat dipaksa korporasi untuk mentaati peraturan yang bersangkutan.<sup>41</sup>

Pertanggungjawaban pidana mengenal adanya prinsip-prinsip pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak pidana ataupun yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Pertama, terdapat prinsip *vicarious liability* yang diartikan sebagai pertanggungjawaban menurut hukum seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of another*). Secara singkat sering diartikan pertanggungjawaban pengganti. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.<sup>42</sup> *Vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti berasal dari tradisi *civil law*<sup>43</sup>. *Vicarious Liability* awalnya merupakan pertanggungjawaban pengganti yang ada dalam hal keperdataan, yaitu *tort law* (hukum ganti rugi) akibat suatu perbuatan yang melawan hukum dan mengakibatkan atau menimbulkan kerusakan (*damage*).

---

<sup>41</sup> Ibid.,

<sup>42</sup> Hutaeruk, Rufinus Hotmaulana. Op.cit. 54

<sup>43</sup> Sistem *civil law* lazimnya juga disebut sistem Eropa Kontinental, berakar dari sistem hukum Romawi (*the Roman Law System*) yang umumnya dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental, Jerman, Perancis, Belanda dan bekas wilayah jajahannya. Sistem hukum ini didasarkan atas *code sipil* yang terkodifikasi. Penjelasan lebih lanjut ini tertuang pada buku Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), 16-17



Seiring berjalannya waktu, *vicarious liability* mulai diterapkan kedalam kasus-kasus pidana.<sup>44</sup>

Prinsip selanjutnya ialah prinsip *strict liability* yang merupakan suatu konsepsi yang tidak memerlukan pembuktian adanya sengaja dan alpa pembuat delik.<sup>45</sup> Menurut Saefullah Wiradipraja yang dikutip dalam buku Rufinus, prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault or liability without fault*) di dalam kepustakaan biasanya dikenal dengan ungkapan *absolute liability* atau *strict liability*. Dengan prinsip tanggungjawab mutlak dimaksudkan tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan adanya kesalahan. Dengan perkataan lain, suatu prinsip tanggungjawab yang memandang kesalahan sebagai suatu yang tidak relevan untuk dipermasalahkan apakah pada kenyataannya ada atau tidak.<sup>46</sup>

#### E. Tinjauan Umum Tentang Uang Pengganti

Istilah uang pengganti dikenal sebagai salah satu pidana tambahan pada tindak pidana korupsi disamping penjatuhan pidana pokok oleh Hakim. Uang pengganti sendiri juga dikenal dengannama PUP (Pembayaran Uang Pengganti). Meskipun sebagai berstelsel pidana tambahan, namun dalam konstruksi normatif maupun penerapan empiriknya, uang pengganti berpeluang dapat diterapkan mendekati bahkan sama dengan pidana pokok (dalam hal ini ancaman pidana

---

<sup>44</sup> Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia*, Law Refrom, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (2012): 8-9

<sup>45</sup> Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 83

<sup>46</sup> Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. Op.cit. 56



penjara) sesuai pasal tindak pidana korupsi yang diancamkan, dan uang pengganti yang demikian disebutkan secara tegas dalam putusan hakim.<sup>47</sup> Sedangkan pengertian uang pengganti belum disebutkan secara jelas dan terperinci dalam peraturan perundang-undangan. Frasa uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi diartikan jumlah yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, hal ini disebutkan pula dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor.<sup>48</sup> Dalam jurnal Ade Paul, istilah uang pengganti mengandung pengertian yang terkait bukan kepentingan perorangan atau individu, tetapi kepentingan publik atau bahkan kepentingan negara. Dalam hal itu dapat dikatakan *criminal and punitive in their nature*. Hal ini jelas berbeda sifatnya, misalnya saja dengan tuntutan ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan hukum, karena kekeliruan mengenai orang-nya, hukum yang diterapkan adalah Pasal 95 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Masalahnya juga berbeda dengan gugatan ganti kerugian sebagai akibat perbuatan yang menjadi dasar dakwaan yang dapat digabungkan kepada

---

<sup>47</sup> Rohrohmana, Basir. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum PRIORIS, Volume 6 No 1, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura, (2017): 44

<sup>48</sup> Pasal 18 ayat (1) huruf b dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

perkara pidana (Pasal 98 KUHP). Pada hal ini, yang terkait adalah kepentingan individu, bukan kepentingan negara.<sup>49</sup>

Uang pengganti tindak pidana korupsi juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Pada Perma ini pun tidak dijelaskan pengertian uang pengganti, namun adanya dasar penentuan uang pengganti yang tercantum dalam Pasal 1.<sup>50</sup>

Ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti tidak dikenal dalam ketentuan mengenai pidana tambahan dalam KUHP. Umumnya pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada pelaku yang melakukan tindak pidana di bidang harta benda adalah pidana penjara atau pidana denda. Pidana denda ini dianggap sebagai “pidana pengganti” atas kerugian harta benda korban yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Dalam UU Tipikor selain dapat dijatuhi pidana penjara dan/atau pidana denda, terdakwa juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Lukas, Ade Paul. *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto, (2010): 82

<sup>50</sup> Dasar penentuan uang pengganti dalam Pasal 1, sebagai berikut :

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan”

<sup>51</sup> Ali, Mahrus. Op.cit. 58-59

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yuridis-normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka,<sup>1</sup> dalam hal ini khususnya adalah mengenai pemidanaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Penelitian jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Dapat disimpulkan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang dalam pengkajiannya dengan mengacu dan mendasarkan pada norma-norma dan kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori dan doktrin hukum, yurisprudensi dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

##### B. Pendekatan Penelitian

Beberapa pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

###### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13

<sup>2</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 118

Metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.<sup>3</sup> Pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang dibahas.<sup>4</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menelaah dan menganalisis konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkaitan dengan pemidanaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar denda dan/atau uang pengganti tindak pidana korupsi.

### C. Jenis dan Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dipakai terdiri dari :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan otoritatif.<sup>5</sup> Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen resmi negara lainnya.<sup>6</sup> Bahan hukum primer ini terdiri atas berbagai peraturan terkait dengan pemidanaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi, antara lain :

---

<sup>3</sup> Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 294-295

<sup>4</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 93

<sup>5</sup> Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 391

<sup>6</sup> Ibid., 42

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Pasal 1 Ayat (3);
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 10;
- c. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Pasal 1 Angka 1, Pasal 18, dan Pasal 20;
- d. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC); Pasal 26;
- f. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; Pasal 31, dan Pasal 32;
- g. Peraturan, Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi; Pasal 1.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang bersifat pendukung yang digunakan penulis untuk mendukung dan menguatkan penelitian penulis, terdiri dari bahan hukum primer, berupa penjelasan peraturan perundang-undangan, Konvensi PBB Menentang Korupsi tahun 2003 (*UNCAC*), buku-buku literatur, dokumen, makalah, jurnal yang membahas mengenai prinsip-

prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli (doktrin), hasil penelitian, skripsi, tesis, ensiklopedia hukum,<sup>7</sup> artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang memuat segala hal yang berkaitan dengan skripsi ini.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan\ pada bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus terjemahan bahasa asing, dan lain sebagainya.

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sesuai dengan sumber hukum baik primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data dilakukan adalah melalui studi (*library research*). Studi kepustakaan adalah sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen hukum yang mendukung obyek penelitian. Terkait hal ini adalah mengenai pemedanaan korupsi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi.

Teknik penulisan bahan hukum ini dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk

---

<sup>7</sup> Ibid., 43

menunjang kebutuhan akan penelitian dan memperoleh informasi yang mendukung dengan penelusuran bahan hukum, maka yang digunakan adalah metode pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan yang dilakukan adalah dengan metode studi kepustakaan dimana mengumpulkan dan menyusun bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

#### E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode interpretasi hukum, berupa :

- a. **Interpretasi Gramatikal** adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum, tata bahasa.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan interpretasi gramatikal terhadap pembedaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi.
- b. **Interpretasi Sistematis**, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik terdapat dalam satu undang-undang maupun terdapat dalam undang-undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), 164-165

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 110



## F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah deskripsi batasan konsep yang terdapat pada judul penelitian, sebagai berikut :

1. **Tindak Pidana Korupsi** adalah setiap orang dengan sengaja melawan hukum .untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkayandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.
2. **Kejahatan Korporasi** setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang bisa diberi hukuman oleh negara baik dalam hukum administrasi negara hukum perdata maupun hukum pidana.
3. **Pidana Tambahan** adalah penjatuhan pidana setelah penjatuhan pidana pokok yang terdiri dari perampasan barang bergerak,berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan maksimal 1 (satu) tahun, serta penutupan seluruh atau sebagian hak atau keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
4. **Uang Pengganti** adalah sebagai pembayaran dengan jumlah sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **A. Kesesuaian Pengaturan Uang Pengganti yang Tidak Dapat Dibayarkan oleh Korporasi Ditinjau dari Unsur Kerugian Keuangan Negara**

##### **1. Posisi Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan**

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah diatur secara khusus, dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor) memiliki jenis-jenis pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak terlepas dari bentuk pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pidana tersebut tertuang dalam Pasal 10 KUHP<sup>1</sup>, selain itu KUHP sendiri tidak membatasi bahwa pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 (tiga) bentuk yang tertera dalam Pasal 10 KUHP tersebut saja, seperti halnya pada UU Tipikor diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain 3 (tiga) bentuk tersebut, yaitu

---

<sup>1</sup> Pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan;

Pidana tambahan :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

diatur pada Pasal 18 Ayat (1) UU Tipikor.<sup>2</sup> Apabila ditinjau dari asas perundang-undangan, yaitu *Lex Specialis derogate Legi Generalis* dengan makna bahwa hukum yang memiliki sifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang memiliki sifat umum. Sehingga, penentuan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi diterapkan pada UU Tipikor dan mengesampingkan pidana tambahan yang terdapat dalam KUHP.

Ketentuan mengenai pidana tambahan seiring berkembang dan diperbarui sesuai dengan sifat hukum yang dinamis. Uang pengganti sebagai salah satu pidana tambahan dalam UU Tipikor yang kemudian diatur secara khusus dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dengan tujuan berperan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur oleh UU Tipikor, yaitu berupa muatan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Perma Uang Pengganti). Perma uang pengganti dibuat dan disahkan dilatarbelakangi karena masih ada hambatan-hambatan dalam memberantas

---

<sup>2</sup> Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

permasalahan korupsi untuk memaksimalkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Disamping itu, aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam penyitaan harta benda milik terpidana untuk pembayaran uang pengganti baik karena harta benda tidak ditemukan, kepemilikan telah beralih, dan belum ada ketentuan yang mengatur mengenai boleh atau tidaknya terpidana membayar sebagian uang pengganti serta masih belum adanya aturan mengenai dapat atau tidaknya pembayaran uang pengganti dikompensasi dengan lamanya pidana penjara subsider.<sup>3</sup> Dalam kondisi harta benda terpidana yang dirampas tetapi nilainya tidak cukup dan tidak mampu untuk membayar uang pengganti, maka terpidana akan dipidana dengan pidana penjara (pidana pengganti) yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok yang telah ditentukan. UU Tipikor tidak mengatur dengan jelas mengenai penentuan lamanya atau jangka waktu penjara pengganti atas tidak dilunasinya uang pengganti terpidana tersebut. Dengan demikian, kekosongan hukum mengenai pidana tambahan uang pengganti dan pidana penjara pengganti ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Perma Uang Pengganti.

## **2. Kedudukan Uang Pengganti sebagai Pidana Tambahan**

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan konsekuensi dari akibatm tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sehingga untuk mengembalikan kerugian tersebut

---

<sup>3</sup> Taufik Rachman, *Artidjo Usulkan Perma Mengenai Uang Pengganti Kasus Korupsi* <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/07/02/mpb0gp-artidjo-usulkan-perma-mengenai-uang-pengganti-kasus-korupsi> (Diakses pada 24 April 2018)

diperlukan sarana yuridis, yaitu berbentuk pembayaran uang pengganti Strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan berdimensi baru harus memperhatikan hakikat permasalahan, apabila lebih dekat dengan bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan pidana denda atau sejenisnya.<sup>4</sup>

Dilihat dari pendekatan tujuan adanya pidana pembayaran uang pengganti tidak terlepas dari tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi pada umumnya, yaitu (1) *Follow the suspect* dan (2) *Follow the money*. Pendekatan tujuan *Follow the suspect* adalah berfokus pada upaya mencari, menemukan, menuntut, dan menghukum pelaku tindak pidana korupsi, dan sedapat mungkin mendatangkan efek jera terhadapnya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi lagi pada waktu yang akan datang. Sedangkan, pendekatan tujuan *Follow the money* merupakan upaya menelusuri (mencari, mengikuti) uang atau harta kekayaan hasil kejahatan dari pelaku tindak pidana korupsi, kemudian sedapat mungkin dilakukan upaya pembaliannya kepada negara.<sup>5</sup>

Dasar penentuan jumlah uang pengganti dijelaskan pada Pasal 1 Perma Uang Pengganti.<sup>6</sup> Pada frasa “sebanyak-banyaknya” tidak dapat diketahui penghitungan besaran secara tetap dan memiliki makna yang luas dalam penentuan pembayaran uang pengganti secara adil. Menurut Kamus

---

<sup>4</sup> Ginanjar, Mohamad. *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, Nomor. 2, Kejaksaan Tinggi Aceh, Banda Aceh, (2016): 321

<sup>5</sup> Rohmana, Basir. *Op.cit.* 52

<sup>6</sup> Dasar penentuan uang pengganti dalam Pasal 1, sebagai berikut :

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan”.

Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut KBBI), “sebanyak-banyaknya” atau dalam kata lain “banyak” mengartikan tidak sedikit, amat, sangat, lebih-lebih serta dapat diartikan “maksimum” dengan makna paling banyak, paling tinggi.<sup>7</sup> Kemudian apabila ditafsirkan secara *argumentum a contrario*<sup>8</sup> maka pidana pembayaran uang pengganti tidak harus sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, jadi bisa kurang dari hasil perolehan tindak pidana korupsi. Hal ini dikatakan keliru karena seharusnya pidana pembayaran uang pengganti ialah sama dengan nilai harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi. Hakikat dari pidana pembayaran uang pengganti adalah kembalinya uang negara secara utuh, sehingga negara tidak mengalami kerugian.<sup>9</sup>

Meninjau pada Pasal 18 Ayat 1 huruf b UU Tipikor<sup>10</sup> dengan Perma Uang Pengganti melihat parameter besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan tindak pidana korupsi. Bahwa terkait parameter perhitungan besaran uang pengganti yang didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dimungkinkan terdapat

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maksimum> (Diakses pada 24 April 2018)

<sup>8</sup> Menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur undang-undang. Sehingga peristiwa yang ada secara fakta bertentangan dengan undang-undang.

<sup>9</sup> Salmi, Akhiar. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini dan Masa Datang*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus, Universitas Indonesia, (2009): 226-227

<sup>10</sup> Pasal 18 Ayat 1 huruf b menjabarkan sebagai berikut :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.



adanya suatu pengecualian. Pengecualian tersebut terjadi, apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh Terdakwa, melainkan telah dialihkan kepada pihak lain dimana pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada Terdakwa kendati Terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya.<sup>11</sup> Bahwa korporasi dianggap sebagai subjek hukum dalam UU Tipikor, maka penjatuhan pidana tambahan uang pengganti dapat pula diterapkan kepada Terdakwa yang merupakan korporasi. Kendati demikian, penjara pengganti atas uang pengganti tidak dapat dijatuhkan, jika subjek hukum dalam perkara korupsi merupakan korporasi.<sup>12</sup>

Kembali pada Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor pada frasa “yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” mengindikasikan bahwa hanya Tersangka/Terdakwa yang benar-benar memiliki kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari keuangan negara atau perekonomian negara sebagai akibat perbuatan secara melawan hukum dan/atau penyalahgunaan kesempatan, kewenangan dan sarana yang dimiliki padanya karena jabatan atau kedudukan. Tegasnya, pidana pembayaran uang pengganti hanya dapat dijatuhkan kepada Tersangka/Terdakwa yang memenuhi unsur “memperkaya diri sendiri” atau “menguntungkan diri sendiri” karena pada peristiwa ini seseorang memiliki kekayaan atau keuntungan yang diperoleh dari tindak

---

<sup>11</sup> Penjelasan umum pada Penjelasan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

<sup>12</sup> Ibid.,



pidana korupsi. Sedangkan, Tersangka/Terdakwa “memperkaya atau menguntungkan orang lain atau korporasi” tidak dapat dijatuhi pidana tambahan pembayaran uang pengganti karena tidak ikut “memperoleh” kekayaan atau keuntungan yang didapatkan secara melawan hukum, yaitu tindak pidana korupsi, kecuali hal tersebut dapat dibuktikan sebaliknya.

Meninjau kasus tindak pidana korupsi dengan memperkaya atau menguntungkan korporasi, pengenaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dapat diberikan oleh korporasi tersebut sepanjang terbukti memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dan bukti-bukti adanya korporasi menerima kekayaan atau keuntungan dari perbuatan secara melawan hukum. Meninjau kasus korupsi Gardu Induk PLN yang dilakukan oleh direktur dan pemilik PT. Arya Sada Perkasa, yaitu Egon Chairul Arifin beserta manager PT. Arya Sada Perkasa, yaitu Tanggul Priamandaru, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”. Kasus korupsi PT. Arya Sada Perkasa dikenakan Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor<sup>13</sup> jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP<sup>14</sup> dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar

<sup>13</sup> Pasal 3 dijabarkan sebagai berikut :

“Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”

<sup>14</sup> Pasal 55 Ayat (1) KUHP dijabarkan sebagai berikut :

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :
  1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Rp,200.000.000.00 (dua ratus juta.rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Karena kasus tindak pidana korupsi tersebut juga menguntungkan korporasi, yaitu PT Arya Sada Perkasa, dengan merugikan keuangan negara, maka Hakim menetapkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti kepada PT Arya Sada Perkasa sebesar Rp 8.972.553.019,- ( $\pm$  delapan miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka aset PT Arya Sada Perkasa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Namun, hingga saat direktur PT Arya Sada Perkasa telah bebas pada Agustus 2017 karena mendapatkan remisi penahanan, uang pengganti yang harus dibayarkan oleh korporasi yang dinaunginya tidak kunjung dibayar sampai tahun 2018 ini. Mengenai kejelasan penyitaan aset PT Arya Sada Perkasa sendiri pun belum menemui titik terang perihal penyitaan aset oleh pihak Kejaksaan.

Penentuan besaran uang pengganti secara menyeluruh, Hakim harus menyelidiki dengan cermat total kerugian keuangan Negara yang diakibatkan dari kasus tindak pidana korupsi dengan memilah kekayaan atau keuntungan dari tiap-tiap pelaku terlebih bagi korporasi sebagai tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana. Karena untuk dapat ditetapkan jumlah pembayaran uang pengganti, kasus tindak pidana korupsi

tidak hanya diukur sesuai dengan unsur merugikan keuangan negara atau tidak, tetapi harus memiliki bukti yang kuat akan adanya akibat atau timbulnya kerugian keuangan negara.

### 3. Instrumen Hukum Pembayaran Uang Pengganti

Pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh Terpidana tindak pidana korupsi telah diatur pada Pasal 9 Perma Uang Pengganti<sup>15</sup>, sedangkan pembayaran uang pengganti yang dilakukan oleh korporasi tidak diatur dalam Perma Uang Pengganti melainkan diatur pada Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya disebut Perma Tindak Pidana oleh Korporasi)<sup>16</sup>.

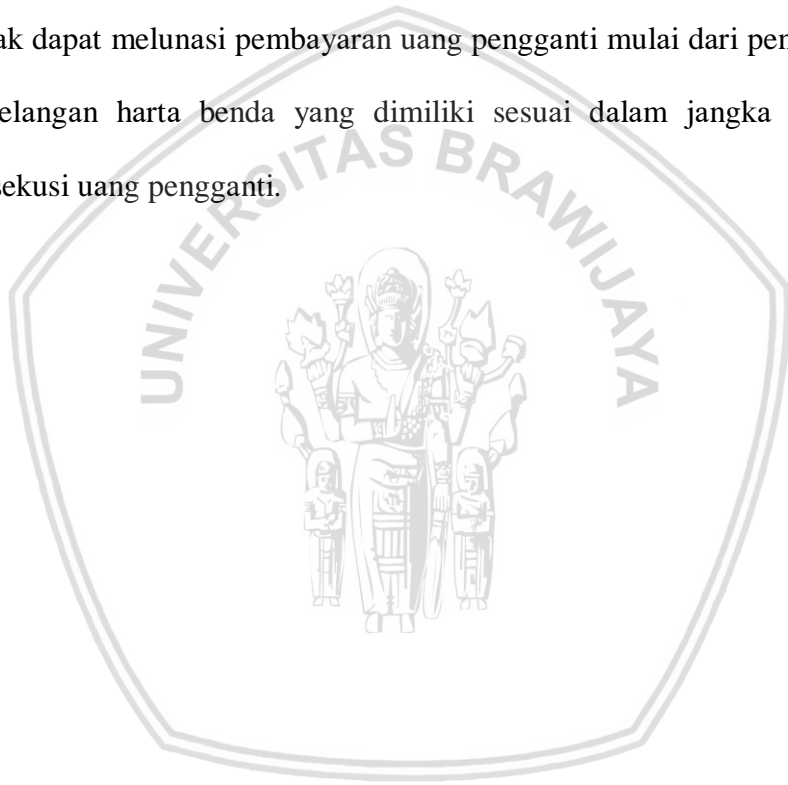
<sup>15</sup> Pasal 9 dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, terpidana tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki terpidana;
- (2) Jika setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud ayat (1) terpidana tetap tidak melunasi pembayaran uang pengganti, Jaksa wajib melelang harta benda tersebut dengan berpedoman pada Pasal 273 Ayat (3) KUHP;
- (3) Pelaksanaan lelang dilakukan selambat-lambatnya 3 bulan setelah dilakukan penyitaan;
- (4) Sepanjang terpidana belum selesai menjalani pidana penjara pokok, Jaksa masih dapat melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta milik terpidana yang ditemukan.

<sup>16</sup> Pasal 32 dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi;
- (3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi, dan restitusi.

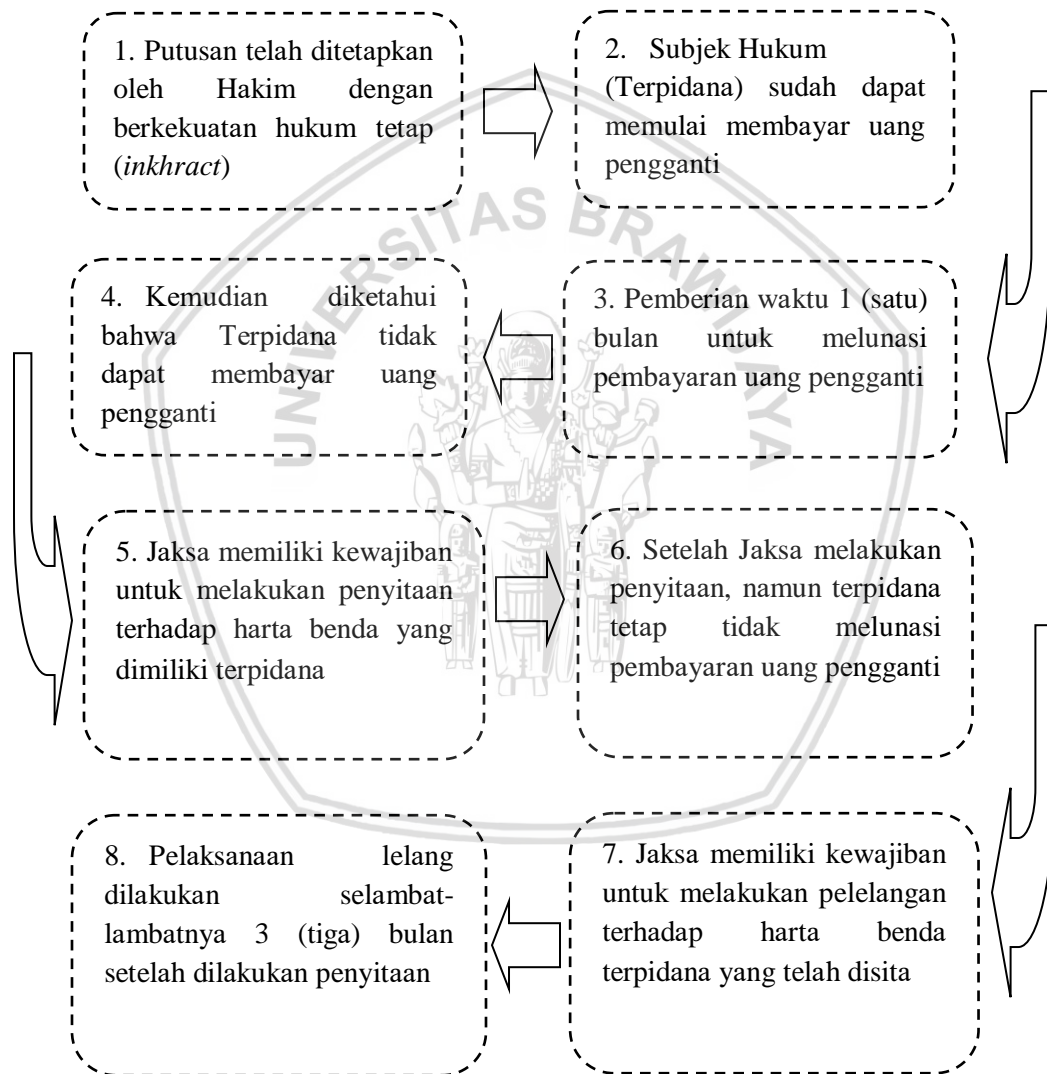
Pada Pasal 9 Perma Uang Pengganti yang telah dijabarkan merupakan dasar eksekusi pembayaran uang pengganti bagi terpidana, sedangkan Pasal 32 Perma Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan ketentuan dalam melakukan pembayaran uang pengganti bagi korporasi. Peraturan tersebut dinilai lugas dalam memberikan penjabaran mengenai jangka waktu pelaksanaan pembayaran uang pengganti, konsekuensi hukum apabila subjek tidak dapat melunasi pembayaran uang pengganti mulai dari penyitaan hingga pelelangan harta benda yang dimiliki sesuai dalam jangka waktu proses eksekusi uang pengganti.



Berikut alur pembayaran uang pengganti bagi terpidana perseorangan dan korporasi :

### BAGAN 1

#### ALUR PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI TERPIDANA PERSEORANGAN



Penjelasan “Alur Pembayaran Uang Pengganti bagi Terpidana Perseorangan”, sebagai berikut :

1. Hakim dalam kewenangannya menetapkan putusan terhadap terpidana yang telah terbukti sesuai fakta-fakta dalam persidangan dan dinyatakan bersalah. Putusan ini haruslah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau dengan kata lain tidak adanya upaya hukum lain yang lebih lanjut, sehingga eksekusi dari putusan tersebut dapat segera dijalankan oleh terpidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Setelah Hakim telah resmi menetapkan putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, terpidana sudah dapat mulai membayar uang pengganti yang telah dibebankan kepadanya dan wajib untuk dibayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Hakim dalam putusan;
3. Terpidana diberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan untuk melunasi pembayaran uang pengganti, baik dapat dilakukan dengan berangsur-angsur secara berkala atau langsung pelunasan selama tidak lebih dari waktu yang ditentukan dan sesuai dengan jumlah uang pengganti tanpa mengurangi atau melebihi yang telah ditetapkan;
4. Kemudian diketahui bahwa Terpidana tidak dapat melaksanakan tanggungjawabnya membayar uang pengganti melebihi jangka

waktu yang ditentukan sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan tanpa ada alasan jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

5. Jaksa memiliki kewajiban dalam melakukan upaya penyitaan terhadap harta benda yang dimiliki Terpidana dengan ketentuan bahwa harta tersebut masih berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terpidana;
6. Setelah Jaksa melakukan upaya penyitaan terhadap harta benda milik Terpidana, namun dari upaya Jaksa tersebut ternyata Terpidana masih tidak memiliki itikad baik untuk membayar uang pengganti secara penuh. Dalam hal ini, Jaksa berpedoman pada Pasal 273 Ayat (3) KUHAP<sup>17</sup>;
7. Kemudian Jaksa berkewajiban untuk melakukan pelelangan terhadap sejumlah harta benda Terpidana yang telah disita sebelumnya. Hal ini bertujuan bahwasanya total nilai dari harta benda tersebut dapat melunasi sejumlah uang pengganti yang wajib dibayarkan oleh Terpidana yang tidak mampu dibayarkan sebelumnya sesuai jangka waktu 1 (satu) bulan;

---

<sup>17</sup> Pasal 273 Ayat (3) KUHAP dijabarkan sebagai berikut :

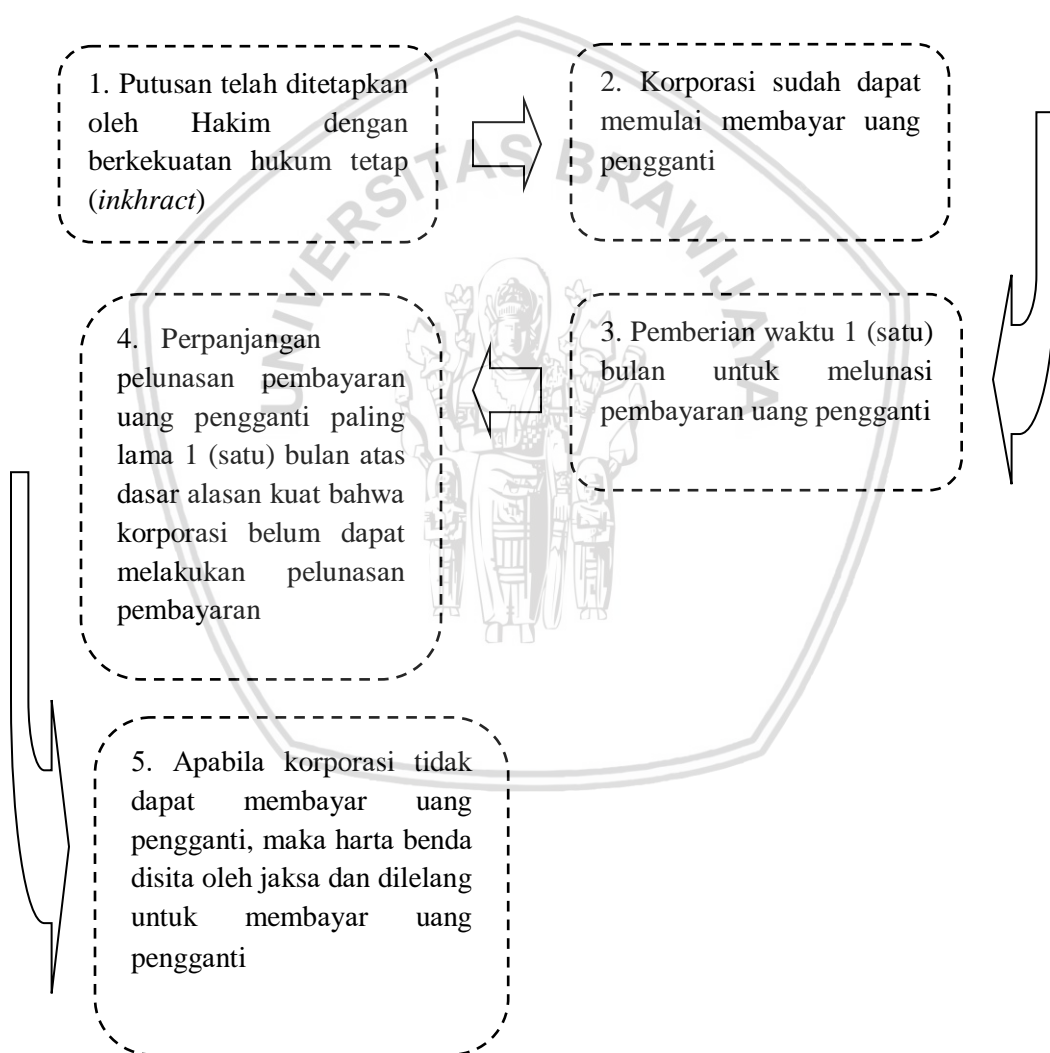
“ jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama Jaksa”



8. Jadwal pelaksanaan pelelangan harta benda milik Terpidana yang digunakan untuk membayar uang pengganti dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penyitaan.

## BAGAN 2

### ALUR PEMBAYARAN UANG PENGGANTI BAGI KORPORASI



Penjelasan “Alur Pembayaran Uang Pengganti Bagi Korporasi”  
sebagai berikut :

1. Hakim dalam kewenangannya menetapkan putusan terhadap korporasi bersamaan dengan Terpidana yang melakukan perbuatan memperkaya korporasi tersebut dan telah terbukti sesuai fakta-fakta dalam persidangan, hingga dinyatakan bersalah. Putusan ini haruslah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) atau dengan kata lain tidak adanya upaya hukum lain yang lebih lanjut, sehingga eksekusi dari putusan tersebut dapat segera dijalankan oleh terpidana yang mewakili korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Setelah Hakim telah resmi menetapkan putusan *inkracht*, korporasi sudah dapat mulai membayar uang pengganti yang telah dibebankan kepadanya dan wajib untuk dibayar sesuai dengan jumlah yang ditetapkan Hakim dalam putusannya. Pada beberapa kasus, uang pengganti yang diwajibkan dibayar oleh korporasi dibebankan dengan diwakilkannya pada Terpidana yang bersangkutan, namun tetap atas nama korporasi;
3. Korporasi diberikan jangka waktu selama 1 (satu) bulan untuk melakukan kewajiban pelunasan pembayaran uang pengganti, baik dapat dilakukan dengan berangsur-angsur secara berkala atau langsung pelunasan selama tidak lebih dari waktu yang ditentukan

- dan sesuai dengan jumlah uang pengganti tanpa mengurangi atau melebihi yang telah ditetapkan;
4. Dalam hal korporasi belum dapat melakukan kewajiban pelunasan pembayaran uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan *inkracht* ersebut ditetapkan, peraturan perundang-undangan memberikan perpanjangan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu awal habis. Hal ini harus didasari dengan alasan kuat dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa korporasi belum dapat melakukan pelunasan pembayaran uang pengganti yang seharusnya menjadi kewajibannya;
  5. Setelah diberikan perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pengganti, namun korporasi masih tetap belum atau tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta benda korporasi yang masih bersangkutan dengan tindak pidana disita oleh Jaksa. Setelah dilakukan upaya penyitaan, Jaksa memiliki kewenangan untuk melakukan lelang harta benda korporasi tersebut dengan hasil lelangnya digunakan untuk menutup pembayaran uang pengganti yang seharusnya dibayarkan oleh korporasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Alur pembayaran uang pengganti antara Bagan 1 dan Bagan 2 yang telah diuraikan memiliki beberapa perbedaan dalam prosesnya. Perbedaan tersebut, meliputi :

**TABEL 2**

**PERBEDAAN ALUR PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ANTARA PERMA UANG PENGGANTI DAN PERMA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI**

No.	Perma Uang Pengganti (Bagan 1)	Perma Tindak Pidana oleh Korporasi (Bagan 2)
1.	Subjek hukum Terpidana perseorangan	Subjek hukum korporasi
2.	Tidak ada perpanjangan pelunasan pembayaran uang pengganti	Ada pemberian perpanjangan jangka waktu pembayaran uang pengganti untuk korporasi, yaitu selama 1 (satu) bulan
3.	Pelaksanaan lelang setelah dilakukan penyitaan terhadap harta benda terkait tindak pidana diberikan jangka waktu tertentu, yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dilakukan upaya penyitaan	Tidak mengatur mengenai jangka waktu pelelangan setelah dilakukan upaya penyitaan (Penjelasan lebih lanjut lihat pada halaman 60)

UU Tipikor pada dasarnya juga mengatur mengenai pengembalian kerugian keuangan negara sebagai upaya penyelamatan keuangan negara. Menurut UU Tipikor, pengembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu instrumen pidana dan instrumen perdata. Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda milik pelaku dan selanjutnya oleh Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim. Sedangkan instrumen perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Instrumen pidana lebih lazim dilakukan karena proses hukumnya lebih sederhana dan mudah.<sup>18</sup>

UU Tipikor mengatur 6 (enam) hal berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, melalui mekanisme perdata dan pidana, yaitu :<sup>19</sup>

1. Gugatan perdata pengembalian kerugian keuangan negara yang nyata disebabkan setelah dilakukan penyidikan ditemukan unsur tidak cukup bukti seperti diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) UU Tipikor<sup>20</sup>;

---

<sup>18</sup> Lukas, Ade Paul. Op.cit. 82

<sup>19</sup> Yuntho, Emerson. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014), 37-38

<sup>20</sup> Pasal 32 Ayat (1) UU Tipikor dijabarkan sebagai berikut :

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”

2. Gugatan perdata disebabkan karena adanya putusan bebas, sedangkan secara nyata ada kerugian keuangan negara, seperti diatur pada Pasal 32 Ayat (1) UU Tipikor;
3. Gugatan perdata dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, seperti diatur dalam Pasal 33 UU Tipikor<sup>21</sup>;
4. Gugatan perdata dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan sidang pengadilan sedangkan, secara nyata telah ada kerugian keuangan negara seperti diatur dalam Pasal 34 UU Tipikor<sup>22</sup>;
5. Gugatan perdata terhadap tindak pidana korupsi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi masih terdapat harta benda yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara, seperti diatur dalam Pasal 38 UU Tipikor<sup>23</sup>;

---

<sup>21</sup> Pasal 33 UU Tipikor dijabarkan sebagai berikut :

“Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”

<sup>22</sup> Pasal 34 UU Tipikor dijabarkan sebagai berikut :

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”

<sup>23</sup> Pasal 38 C UU Tipikor dijabarkan sebagai berikut :

“Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk

6. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, seperti diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor<sup>24</sup>.

Mekanisme gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai untuk pengembalian kerugian keuangan negara, setidaknya dalam keadaan tertentu. Apabila UU Tipikor dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan pidana, maka diaturnya upaya gugatan perdata dalam undang-undang tersebut menunjukkan pula dalam suatu peraturan perundang-undangan dapat sekaligus mengandung aspek hukum pidana maupun perdata bahkan juga hukum administrasi. Meskipun nampaknya menjanjikan, namun berdasarkan hasil penelitian Komisi Hukum Nasional (KHN) bahwa pengembalian kerugian keuangan negara dengan mekanisme hukum perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 38 C UU Tipikor belum dilaksanakan atau dengan kata lain, belum pernah ada perkara empiris, dimana pasal-pasal tersebut telah dijadikan dasar untuk litigasi perkara perdata.<sup>25</sup>

---

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B Ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap pidana dan atau ahli warisnya”

<sup>24</sup> Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU Tipikor dijabarkan sebagai berikut :

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

<sup>25</sup> Emerson Yuntho, dkk, Loc.cit.,



#### 4. Ketidakmampuan Membayar Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Tindak-pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi menjadi salah satu *extraordinary crime* di Indonesia. Namun, menjerat korporasi menjadi Tersangka/Terdakwa pada kasus tindak pidana korporasi merupakan kemajuan yang efisien bagi KPK karena melihat kembali bahwa korporasi masih menjadi persoalan untuk ditetapkannya sebagai subjek hukum, apalagi ditetapkan sebagai Tersangka/Terdakwa. Hal ini menjadi sebuah perkembangan baik sesuai dengan sifat hukum yang selalu berkembang.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi seringkali dilihat dalam kenyataan di lapangan hampir selalu lolos dari jerat hukum. Kurangnya penanganan dan pemahaman akan korporasi sebagai subjek hukum pidana melahirkan banyaknya spekulasi-spekulasi hukum yang menjadikan aparat penegak hukum kesulitan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi yang erat kaitannya dengan korporasi yang bersangkutan.<sup>26</sup> Meninjau kasus Direktur PT Arya Sada Perkasa yang lolos dari pantauan penegak hukum atas tidak membayar uang pengganti hingga waktu pembebasan. Hukuman pembayaran uang pengganti yang ditujukan untuk korporasi telah melampaui jangka waktu pembayaran, hingga masih belum adanya penyitaan atas harta benda korporasi yang digunakan sebagai pembayaran atas uang pengganti sesuai prosedur peraturan perundang-undangan. Hakikat seharusnya uang pengganti adalah kembalinya uang negara secara utuh, sehingga negara tidak

---

<sup>26</sup> Gultom, Liwijaya Lestari. *Pemidaan Terhadap Korporasi Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, (2015): 6

mengalami kerugian keuangan, malah belum dapat membantu memperbaiki perekonomian negara. Tidak hanya itu, hal ini juga memberikan celah atas lemahnya peraturan perundang-undangan.

Penerapan pemidanaan bagi korporasi telah dikhususkan dan diperdalam kembali pada Perma Tindak Pidana oleh Korporasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada Perma tersebut mengidentifikasi kesalahan korporasi baik berbentuk kesengajaan maupun karena kelalaian, yaitu :<sup>27</sup>

1. Apabila kejahatan dilakukan untuk memberikan manfaat atau keuntungan maupun untuk kepentingan korporasi;
2. Apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Apabila korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan termasuk mencegah dampak yang lebih besar setelah terjadinya tindak pidana;
4. Apabila penegak hukum menemukan bukti bahwa pemegang saham atau anggota direksi atau komisaris bahkan pegawai rendahan sekalipun melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi dan korporasi menerima keuntungan dari tindakan tersebut, maka dapat diindikasikan korporasi telah melakukan tindak pidana;
5. Ditentukan penyesuaian identitas korporasi dalam surat panggilan, surat dakwaan, dan surat utusan terhadap korporasi, sehingga

---

<sup>27</sup> Anonim, *KPK : Perma Nomor 13 Membuat Korporasi Bisa Dipidana*. <https://www.liputan6.com/news/read/2822573/kpk-perma-nomor-13-membuat-korporasi-bisa-dipidana> (diakses pada 28 Mei 2018)

prosesi penanganan korporasi lebih memberikan kepastian hukum. Selanjutnya, aset korporasi yang digunakan sebagai alat atau dari hasil kejahatan juga dapat segera dijual melalui lelang meskipun belum ada putusan pengadilan.

Adanya celah hukum pada ketentuan Perma Tindak Pidana oleh Korporasi memberikan beberapa kelemahan, sehingga menjadikan salah satu tolak ukur kurang berhasilnya penerapan pidanaaan bagi korporasi, khususnya pada eksekusi pembayaran uang pengganti. Kelemahan-kelemahan Perma Tindak Pidana oleh Korporasi yang disusun dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**TABEL 3**

**KELEMAHAN PERMA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA  
PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI**

No.	KELEMAHAN
1.	Perma masih bersifat transisi untuk mengisi kekosongan hukum. Pengaturan lebih lanjut seharusnya berada dalam KUHP. Namun, rancangan KUHP masih dibahas
2.	Isi Perma dianggap akan bertabrakan dengan aturan internal yang serupa di institusi lain. Sebagai contoh Kejaksaan Republik Indonesia telah memiliki Peraturan Jaksa Agung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi

3.	Perma hanya mengatu persoalan formal-prosedural, belum mengatur hal-hal yang substansial. Seperti menarik pertanggungjawaban pidana korporasi kapan suatu perbuatan dapat dibebankan kepada korporasi dan kapan suatu perbuatan tidak dapat dibebankan kepada korporasi
4.	Perma belum menyentuh korporasi dalam bentuk non badan hukum. Perma juga disebut tidak menjelaskan apa-apa saja korporasi yang merupakan badan hukum dan apa-apa saja korporasi yang merupakan bukan badan hukum
5.	Batasan dalam menentukan perbuatan seseorang yang tidak punya kewenangan mengambil keputusan, namun dapat mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi atau dalam Perma disebut “Pengurus”. Batasan ini dinilai masih belum jelas
6.	Tidak ada penjelasan tentang perbedaan pertanggungjawaban korporasi grub korporasi dengan penyertaan tindak pidana
7.	Sanksi yang diberikan masih sebatas denda. Seharusnya sanksi bisa ditambah dengan pencabutan izin usaha, status badan hukum, perampasan keuntungan, penutupan sebagian atau seluruhnya perusahaan, perbaikan akibat dari tindak pidana atau menempatkan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun
8.	Perma tidak mengatur perbedaan signifikan dalam menetapkan korporasi atau pengurus sebagai tersangka/terdakwa

Sumber : Data Sekunder, *diolah*, 2018

Meninjau pada poin kedua, pada beberapa pandangan menyatakan bahwa Perma Tindak Pidana oleh Korporasi ini bukanlah produk hukum, namun Perma tersebut merupakan pedoman teknis internal bagi Hakim dalam memeriksa dan mengadili, akan tetapi sepanjang peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berlaku pada saat itu. Sehingga, untuk aparat penegak hukum lain, seperti pada institusi Kejaksaan Republik Indonesia, apabila ditemukan adanya hal yang bertentangan dengan pedoman hakim, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku. Karena kedudukan peraturan perundang-undangan lebih tinggi daripada Perma. Mengacu pada Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>28</sup> memuat tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan beserta tingkat kekuatan hukum berdasarkan urutan yang tertulis.

Perihal isi Perma Tindak Pidana oleh Korporasi hanya mengatur formal-prosedural terhadap pengaturan pembayaran uang pengganti dan sanksi bagi korporasi apabila tidak membayar uang pengganti. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 32 Perma Tindak Pidana oleh Korporasi dimana Pidana

---

<sup>28</sup> Pasal 7 dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :
  - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tambahan hanya diatur dalam pasal tersebut. Pada poin keempat, Perma Tindak Pidana oleh Korporasi belum menyebutkan penyertaan korporasi non badan hukum untuk dijadikan sebagai terpidana korupsi dan pembagian korporasi antara badan hukum dan non badan hukum belum disebut serta dijelaskan secara ringkas. Karena undang-undang mengenai badan hukum sendiri juga masih belum ada di Indonesia. Pada Perma ini hanya menjelaskan pengertian dari korporasi itu sendiri yang tertuang pada Pasal 1 Angka 1 dan Angka 2 Perma Tindak Pidana oleh Korporasi<sup>29</sup>.

Mengacu pada poin kelima, Perma tidak menjelaskan mengenai pemberian batasan pada seseorang yang dapat disebut sebagai pengurus. Pemberian batasan ini dapat meliputi pada sampai mana tindakan atau perbuatan pengurus tersebut dalam keterkaitannya terhadap keuntungan yang diperoleh korporasi dari perbuatan melawan hukum. Karena pengurus disini dikatakan tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, namun dapat mengendalikan atau mempengaruhi kebijakan korporasi. Lebih jelasnya pengertian pengurus tertuang pada Pasal 1 Angka 10 Perma Tindak Pidana oleh Korporasi<sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Pengertian korporasi tertuang pada Pasal 1 yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;
2. Korporasi induk (*parent company*) adalah perusahaan berbadan hukum yang memiliki dua atau lebih anak perusahaan yang disebut perusahaan subsidiary yang juga memiliki status badan hukum tersendiri.

<sup>30</sup> Pengertian pengurus tertuang pada Pasal 1 Angka 10 yang dijabarkan sebagai berikut :

“Pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan pengurusan korporasi sesuai anggaran dasar atau undang-undang yang berwenang mewakili korporasi, termasuk mereka yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, namun dalam kenyataannya dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi



Pembentukan Perma Nomor 13 Tahun 2016 terdiri dari 6 Bab dan 37 Pasal yang mengatur tentang tata cara penanganan perkara tindak pidana oleh korporasi ini dilandasi dengan tujuan untuk pedoman bagi penegak hukum dalam menangani perkara pidana dengan pelaku korporasi dan/atau pengurus, mengisi kekosongan hukum khususnya hukum acara pidana dalam penanganan perkara pidana korporasi.<sup>31</sup> Namun, kelemahan-kelemahan yang ditemukan pada Perma tersebut menjadi salah satu faktor kurang terealisasinya penegakan hukum yang tepat bagi para pelaku tindak pidana, khususnya korporasi yang melakukan tindak pidana.

Pembebanan korporasi terhadap pembayaran uang pengganti merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pada titik ketidakmampuan korporasi dalam melakukan pembayaran uang pengganti perlu dicermati kembali, khususnya pada pengelolaan korporasi setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan hukuman baik kepada direktur dan/atau pihak yang bersangkutan melakukan tindak pidana maupun pada korporasi yang telah diberikan keuntungan secara melawan hukum.

Frasa “ketidakmampuan” berasal dari kata “mampu” yang ditafsirkan sebagai bisa, sanggup, kuasa, dan dapat. Sedangkan pada arti secara keseluruhan, ketidakmampuan ialah tiada atau tidak sanggup melakukan atau

---

atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana”

<sup>31</sup> Permana, Wahyu Priyanka Nata. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS)* : Sinkronisasi Penanganan Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Subjek Hukum Korporasi, Volume II Nomor 1, Mei 2017, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (2017): 71



berbuat sesuatu sebagaimana mestinya karena faktor-faktor tertentu. Pada keadaan faktor-faktor tertentu tersebut, korporasi tidak mampu membayar uang pengganti karena harta benda tidak tercukupi. Namun, tidak tercukupinya harta benda milik korporasi sangat minim kemungkinannya karena korporasi pasti memiliki nilai kekayaan yang besar, sebab tanpa kekayaan korporasi tidak akan bisa beroperasi. Kecuali, korporasi segera melakukan pemindahan aset ke tempat atau hal lain yang sulit untuk dilacak penegak hukum dengan tujuan menyelamatkan harta bendanya dan menghindari pembayaran denda, uang pengganti, serta kewajiban lainnya sebagai akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukan korporasi tersebut.

#### **5. Unsur Kerugian Keuangan Negara pada Hakikat Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan kerah putih yang seringkali meresahkan masyarakat. Korupsi dalam segala bentuknya tentu saja membuat kesengsaraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hilangnya uang negara dikarenakan korupsi tentu saja membuat hak-hak rakyat yang diatur oleh konstitusi dasar Indonesia, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945) menjadi terabaikan. Hak-hak masyarakat untuk kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, sarana transportasi, akses terhadap teknologi menjadi sulit,. Intinya adalah bahwa korupsi menghadirkan banyak kekecewaan bagi rakyat banyak. Korupsi pada dasarnya adalah menghabiskan anggaran negara yang

awalnya ditujukan untuk kepentingan rakyat, kemudian diambil menjadi keuntungan pribadi atau sekelompok orang.<sup>32</sup>

Pengembalian keuangan hasil tindak pidana korupsi merupakan norma yang berdiri sendiri dengan prinsip hukum bahwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak boleh mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi. Dalam konteks tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi, maka perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi kerusakan dan degradasi (kemunduran) kuantitas dan kualitas perekonomian serta mensejahterakan masyarakat yang terkena dampak dari akibat yang ditimbulkan pelaku tindak pidana korupsi.<sup>33</sup>

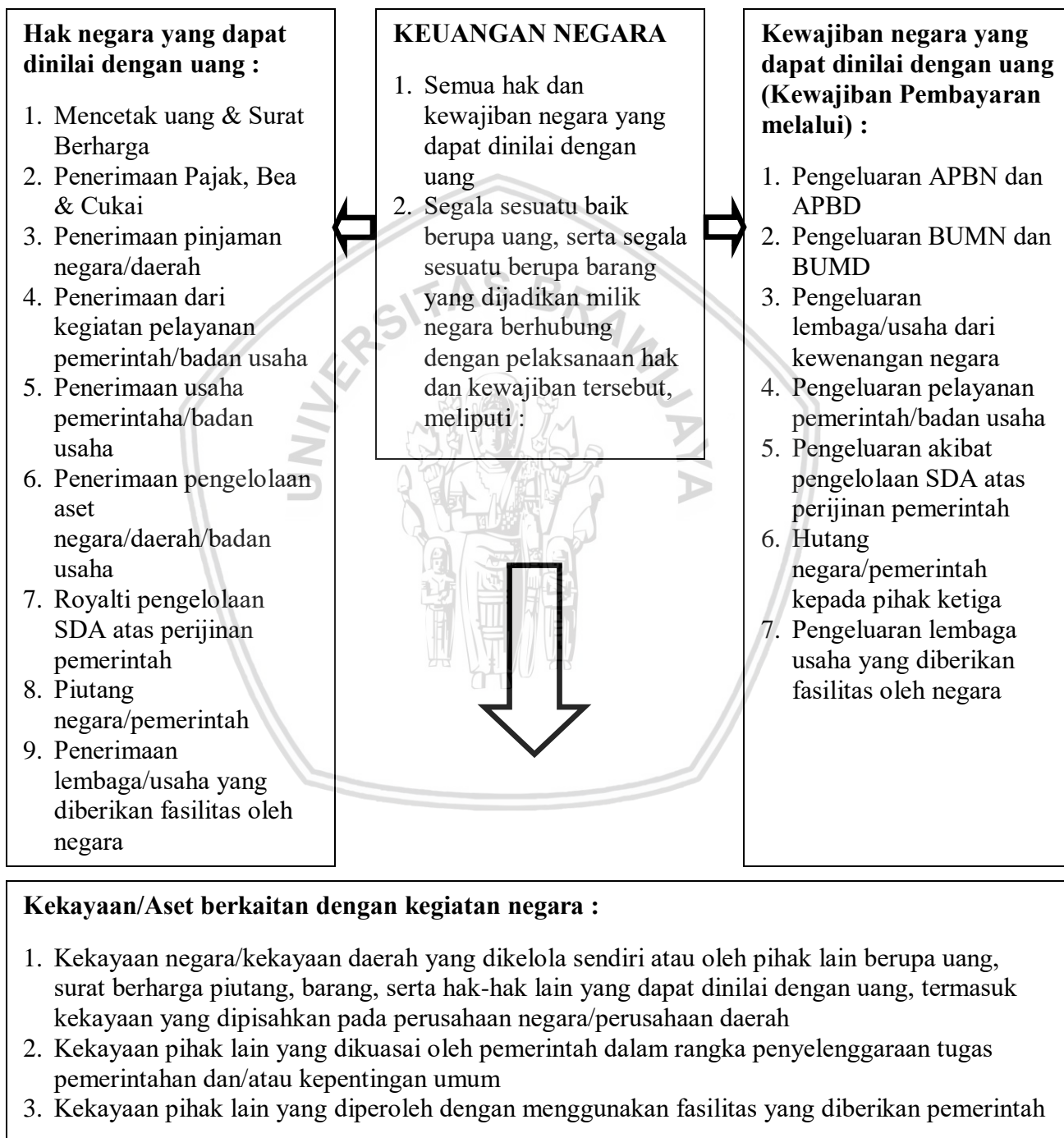
---

<sup>32</sup> Rambey, Guntur. *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda, De Lega Lata*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, (2016): 147

<sup>33</sup> Musahib, Abdul Razak. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, E-Journal*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, (2015): 4

## SKEMA 1

### RINCIAN KEUANGAN NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA (MENGATUR ASPEK : BENTUK, OBJEK, DAN KEGIATAN KEUANGAN NEGARA)



Sumber : Data Primer, *diolah*, 2018

Terminologi keuangan negara yang terkandung dalam UU Tipikor pada penjelasan alinea ke-3, “keuangan negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :<sup>34</sup>

1. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara serta segala hak dan kewajiban yang timbul karena “berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban” :<sup>35</sup>

1. Pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. BUMN/BUMD;

---

<sup>34</sup> Makawimbang, Hernold Ferry. Op.cit., 14-15

<sup>35</sup> Ibid.,

3. Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Keuangan negara menjadi suatu polemik apabila dikaitkan pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan tertentu, sehingga negara mengalami dampak buruk dari perbuatan tersebut. Dampak yang ditimbulkan ialah terjadinya kerugian keuangan negara. Ditinjau dari aspek pendekatan normatif dan praktis, pengaturan wilayah “kerugian keuangan negara” dalam ranah tindak pidana korupsi memiliki beberapa pemikiran, yaitu :<sup>36</sup>

1. Apabila berkurangnya sekecil apapun kerugian keuangan negara jika itu akibat perbuatan melawan hukum, dianggap perbuatan pidana (tindak pidana korupsi). Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor pertimbangan hakim (artinya tetap dihukum bukan membebaskan);
2. Kerugian keuangan negara (delik materiil) sebagai akibat dari “perbuatan melawan hukum” (delik formal) terjadinya bukan akibat lalai atau *force majeure* atau karena ada kewenangan perintah

---

<sup>36</sup> Makawimbang, Hernold Ferry. Op.cit., 53-54

jabatan yang disalahgunakan dalam melakukan suatu kebijakan pemerintah (*beleid*, *vrissbestuur*, atau *discretionary power*), tetapi akibat perbuatan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan;

3. Kerugian keuangan negara di hubungkan dengan unsur delik (perbuatan pidana) “perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang-lain atau korporasi” atau berhubungan dengan menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan;
4. Tidak ada sanksi administratif, yang ada hanya hukuman pidana penjara, kurungan, dan denda (Pasal 10 KUHP) dan/atau hukuman pidana tambahan (penggantian uang atau pemulihan kerugian keuangan negara) dengan mengembalikan “hasil tindak pidana korupsi” atau hukuman penjara pengganti.

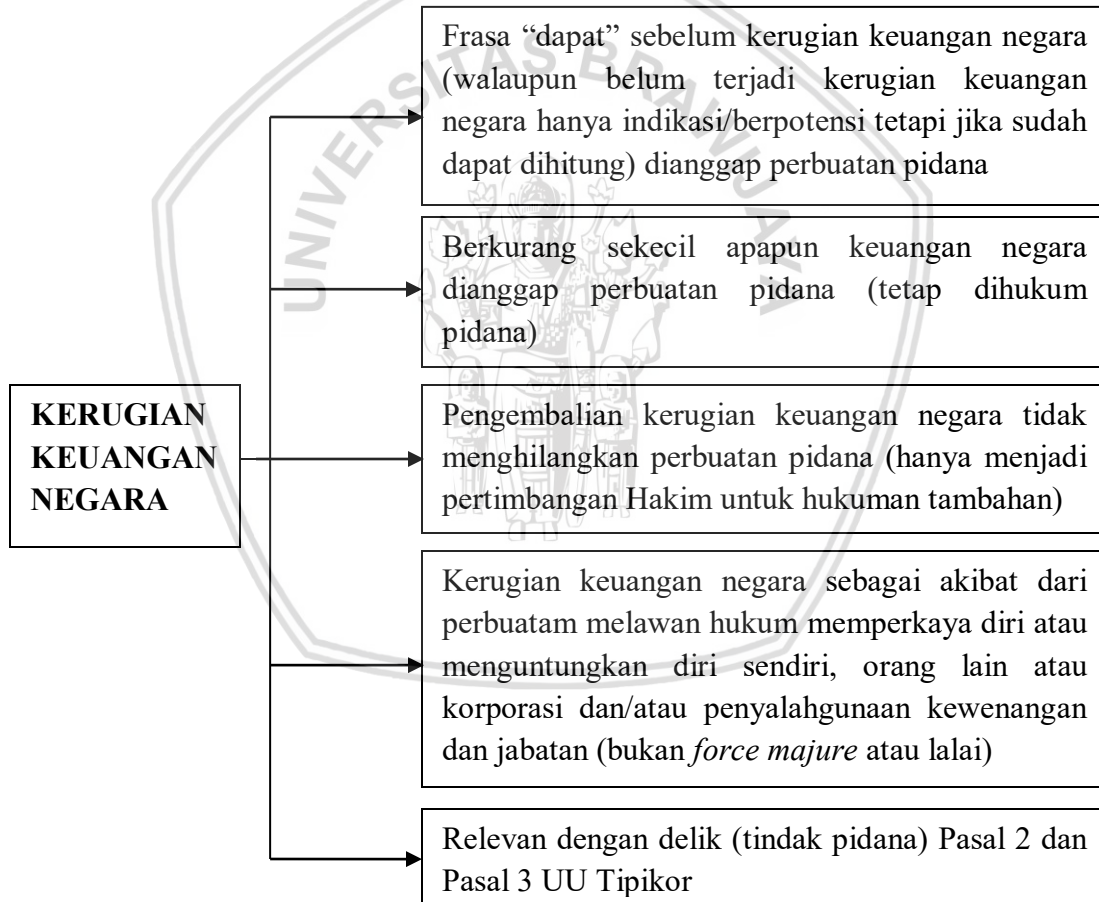
Teori pengembalian kerugian keuangan negara adalah teori hukum yang menjelaskan sistem hukum pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang memberikan kemampuan, tugas, dan tanggungjawab kepada institusi negara dan institusi hukum untuk memberikan perlindungan dan peluang kepada individu-individu dalam masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Teori ini dilandaskan pada prinsip dasar berikan kepada negara yang menjadi hak negara. Dalam hak negara terkandung kewajiban negara yang merupakan hak individu masyarakat,

sehingga prinsip tersebut setara dan sebangun dengan prinsip berikan kepada rakyat apa yang menjadi hak rakyat.<sup>37</sup>

Dari rumusan diatas, dapat digambarkan dalam skema pemahaman kerugian keuangan negara sebagai ranah hukum pidana, sebagai berikut :

## SKEMA 2

### KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI RANAH PENGATURAN HUKUM PIDANA



Sumber : Data Primer, *diolah*, 2018

<sup>37</sup> Sultan. *Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Hasanuddin University, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (2016): 12



Argumentasi tersebut diatas dapat dianalisis penggunaan analogi “kerugian negara” sebagai kerugian keuangan negara dalam proses penyidikan dan penjatuhan pidana kepada orang yang bersalah melakukan tindak pidana (penentuan *criminal responsibility* dan *criminal liability*). Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan legislasi substansi penyusunan UU Tipikor, antara lain adalah tidak adanya rumusan atau pengertian “kerugian keuangan negara” padahal sebagai delik materiil dan juga perbuatan merugikan merupakan delik formal, termasuk kewenangan penghitungan tidak diatur, hal tersebut mengakibatkan proses penghitungan penuntutan dari perumusan putusan oleh Hakim menggunakan interpretasi.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Makawimbang, Hernold Ferry. Op.cit., 55-56

## **B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Kualifikasi Strategi dan Teknik Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi**

Melihat perkembangan terakhir mengenai pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan secara individual atau perseorangan, tetapi dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok di dalam suatu unit kerja atau perusahaan. Tindakan berkelompok ini berkembang menjadi kerjasama antar-unit kerja yang melibatkan pihak ketiga (rekanan, wajib pajak), unit kerja dengan instansi lain, antar-instansi dan perkembangan terakhir antara eksekutif dengan legislatif, eksekutif dengan auditif yang semuanya dilakukan kadangkala sepengetahuan atasan secara berjenjang sampai dengan tingkat pimpinan.<sup>39</sup>

Selain itu, di bidang pengelolaan dana pembangunan, baik yang bersumber dari dana dalam negeri maupun luar negeri, telah ditemukan pula berbagai jenis/bentuk penyimpangan dan kelemahan yang merupakan titik rawan korupsi. Hal ini bermula dari tahap awal perencanaan atau pra perencanaan suatu proyek atau program pembangunan sampai pada tahap pelaksanaan, dan berlanjut pada tahap penyelesaian dan pemanfaatan proyek atau program.<sup>40</sup> Korporasi khususnya yang berbentuk Persero merupakan salah satu bentuk BUMN yang modal atau saham secara seluruh atau paling

---

<sup>39</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 31

<sup>40</sup> Ibid.,

sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utama untuk mengejar keuntungan.

Pada kasus korupsi Gardu induk PLN, meliputi GI 150 KV New Sanur Bali dan GI 150 KV Cilegon Baru II yang dilakukan oleh PT Arya Sada Perkasa menggunakan metode aspek penyelenggaraan pemerintahan dengan perencanaan proyek pembangunan yang menyangkut kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan permasalahan pembebasan tanah. Karena pada saat pelaksanaan penandatanganan kontrak terhadap kegiatan pembangunan gardu induk tersebut, ternyata belum ada penyelesaian pembebasan tanah yang seharusnya akan digunakan untuk pembangunan Gardu Induk PLN yang telah diprogramkan tersebut. Hal ini berkaitan dengan aspek penyelenggaraan pemerintah lain, yaitu pelaksanaan proyek pembangunan untuk kepentingan umum, salah satunya proyek listrik. Karena dari awal telah terjadi adanya permasalahan mengenai pembebasan lahan untuk dibangunnya Gardu Induk PLN, hingga berujung pada proyek pembangunan Gardu PLN fiktif atau tidak ada bukti adanya pelaksanaan pengembangan dari proyek pemerintah pada unit pembangkit jaringan Jawa, Bali, dan Nusa-Tenggara yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(APBN) senilai Rp 1 triliun untuk anggaran tahun 2011 sampai tahun 2013.

Pada mulanya, kontrak dilaksanakan pada bulan Desember 2011 hingga Juni 2013 dengan lingkup pekerjaan pengadaan pemasangan dan transfortasi pekerjaan elektromekanikal dan pengadaan pemasangan serta transfortasi pekerjaan sipil. Pada saat, pelaksanaan penandatanganan kontrak

terhadap kegiatan pembangunan Gardu Induk, ternyata belum ada penyelesaian pembebasan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Setelah dilakukan pembayaran pencairan uang muka dan termin satu ternyata pihak kontraktor (dalam hal ini PT Arya Sada Perkasa) tidak melaksanakan pekerjaan sesuai progres fisik yang dilaporkan alias fiktif. Hal ini didukung juga dengan bukti ketika Jaksa di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang menangani perkara korupsi PT Arya Sada Perkasa menyelidiki ada atau tidaknya pembangunan Gardu Induk PLN yang dibangun dibawah naungan usaha kontruksi PT Arya Sada Perkasa tersebut. Hasil laporan yang diterima Tim Jaksa Penyidik bahwa pengerjaan proyek pembangunan Gardu Induk PLN tersebut memang terbukti fiktif. Hingga saat itu, Tim Jaksa Penyidik meminta dan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk segera menghitung besaran kerugian keuangan negara yang didapat karena adanya pengadaan proyek pembangunan fiktif tersebut.<sup>41</sup>

Pada perilaku negatif atas korupsi memiliki akibat yang berdampak pada penyimpangan anggaran negara, pendapat ini dikutip oleh *Corporation of Insurance Brokers of Australia (CIBA)* dalam buku Surachmin dan Sunandi Cahaya, yaitu :<sup>42</sup>

#### 1. Menurunnya Kualitas Pelayanan Publik

---

<sup>41</sup> Ainur, Rahman. *Lima Orang Kembali Ditetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan Gardu Induk PLN*. <http://www.gresnews.com/berita/hukum/91223-lima-orang-kembali-ditetapkan-tersangka-korupsi-pembangunan-gardu-induk-pln/> (Diakses pada 31 Mei 2018)

<sup>42</sup> Ibid., 83--84

Pemberian suap biasanya diambil dari bagian dana proyek, sehingga anggaran riil yang digunakan untuk proyek menjadi berada di bawah angka semestinya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kualitas hasil dari pelaksanaan proyek.

## 2. Terenggutnya Hak-Hak Dasar Warga Negara

Hak untuk hidup layak, hak untuk mengakses sumber daya, dan hak-hak dasar lainnya, tidak dapat dipenuhi oleh negara. Penyebabnya, yaitu karena banyaknya uang negara seharusnya bisa digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, justru lari ke kantong-kantong pribadi.

## 3. Rusaknya Sendi-Sendi Prinsip dari Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

Prinsip-prinsip anggaran yang baik, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin, efektif dan efisien, serta memenuhi asas kepatutan yang semuanya itu merupakan sendi prinsip pengelolaan keuangan negara dilanggar tanpa adanya keterbukaan.

## 4. Meningkatnya Kesenjangan Sosial

Kesenjangan social yang telah ada menjadi lebih kuat, bahkan semakin parah karena kelompok miskin dan marginal tidak pernah mendapatkan akses terhadap anggaran secara layak termasuk mengontrol proses, karena ketiadaan ruang bagi transparansi dan partisipasi.

## 5. Hilangnya Kepercayaan Investor

Banyaknya korupsi dan tidak adanya kepastian hukum, telah menyebabkan banyak investor merasa enggan menanamkan modalnya di Indonesia. Bahkan investor yang ada pun henggang. Akibatnya disamping iklim pertumbuhan ekonomi menjadi kurang kondusif, juga meningkatkan angka pengangguran.

## 6. Terjadinya Degradasi Moral dan Etos Kerja

Memperoleh uang tanpa kerja keras telah mengakibatkan si pelaku korupsi terbuai dan tidak terpacu untuk bekerja keras.

## 2. Kesesuaian Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi

### a. Kriteria Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana korporasi memiliki kriteria-kriteria yang harus diperhatikan karena di sisi lain, kejahatan korporasi memberikan dampak yang besar bagi publik. Kriteria-kriteria tersebut antara lain :<sup>43</sup>

1. *The degree off loss to the public* (tingkat kerugian terhadap publik);
2. *The level of complicity by high corporate managers* (tingkat keterlibatan oleh jajaran manager);
3. *The duration of violation* (durasi pelanggaran);
4. *The frequensi of the violation by the corporation* (frekuensi pelanggaran oleh korporasi);

<sup>43</sup> Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Volume 44 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (2013): 586-587

5. *Evidence of intent violate* (alat bukti yang dimaksudkan untuk melakukan pelanggaran);
6. *Evidence of extortion and bribery cases* (alat bukti pemerasan, semisa dalam kasus suap);
7. *The degree of notoriety engendered by the media* (tingkat pengetahuan publik tentang hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pemberitaan media);
8. *Precedent in law* (jurisprudensi);
9. *The history of serious violation by the corporation* (riwayat pelanggaran-pelanggaran serius oleh korporasi);
10. *Deterrence potential* (kemungkinan pencegahan);
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation* (derajat kerjasama korporasi yang ditunjukkan oleh korporasi).

#### **b. Aliran Pertanggungjawaban Pidana**

Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi tentunya tidak lepas dari hal tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana terdapat dua aliran yang membahas antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Aliran monistis, yaitu memandang bahwa di dalam tindak pidana



repository.ub.ac.id

terkandung juga pertanggungjawaban. Unsur-unsur dalam aliran ini, meliputi :<sup>44</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandlstaand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar persoon*);

Aliran ini menjelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana tidak memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>45</sup> Sedangkan aliran dualistis, yaitu memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk didalamnya, masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya merujuk pada dilarangnya suatu perbuatan.<sup>46</sup> Aliran ini menjelaskan unsur-unsur tindak pidana memisahkan antara perbuatan dan orang-orang yang melakukan perbuatan itu.<sup>47</sup>

Secara prinsipil, antara penganut monistis dan dualistis tidak memiliki perbedaan yang mencolok terkait dengan pemaknaan mengenai tindak pidana. Hanya saja bagi yang berpandangan monistis, seorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi penganut

---

<sup>44</sup> Saputra, Rony. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Cita Hukum, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (2015): 275

<sup>45</sup> Ruba'i, Masruchin. *Hukum Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), 82

<sup>46</sup> Saputra, Rony. Loc.cit.,

<sup>47</sup> Ruba'i, Masruchin. Loc.cit.,

dualistis sama sekali belum cukup syarat untuk dipidana karena harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus pada orang yang berbuat. Aliran dualistis mensyaratkan orang tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, maka perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut dan berlaku asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan)<sup>48</sup>. Dalam hal ini aliran dualistis memandang, meskipun seseorang terbukti melakukan suatu tindak pidana, tidak secara otomatis ia dapat langsung dinyatakan bersalah, tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut.<sup>49</sup>

Pada hukum pidana, korporasi (sebagai badan hukum) menjadi salah satu subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana disamping subjek hukum perorangan. Mengenai perbuatan melawan hukum, korporasi sendiri maupun bersama-sama dengan pengurus, komisaris, atau pemilik perusahaan melakukan tindak pidana, maka munculah konsep perusahaan pemeras (*corporateering*). Dalam hal ini perusahaan lebih mengutamakan tindakannya yang selalu menguntungkan perusahaannya sendiri. Bila perlu mencuri, merampok, menipu, atau

---

<sup>48</sup> Asas tiada pidana tanpa kesalahan mengandung arti bahwa walaupun perbuatan seseorang telah bersifat melawan hukum, namun itu tidak dapat dipidana apabila ia tidak dapat dinyatakan bersalah. Jadi kesalahan merupakan suatu syarat untuk dapat dijatuhkannya pidana. Penjelasan ini merujuk pada buku Ruba'i, Masruchin. *Hukum Pidana* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), 89

<sup>49</sup> Saputra, Rony. Op.cit., 276

memalsukan laporan keuangan tanpa memperdulikan pihak pesaing atau masyarakat luas.<sup>50</sup>

Menurut Muladi dan Dwidja Priyatno yang dikutip dalam jurnal Heni Siswanto membenaran pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana dapat didasarkan hal-hal berikut :<sup>51</sup>

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUDNRI 1945<sup>52</sup>;
- c. Untuk memberantas *anomie of succes* (sukses tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen; dan
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Pengaturan pidana tentang pertanggungjawabannpidanamkorporasi dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, tetapi jarang diterapkan dalam praktik.

---

<sup>50</sup> Setiyawan, Wahyu Beny Mukti. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, E-Journal Universitas Surakarta, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Surakarta: Surakarta, (2014): 5-6

<sup>51</sup> Siswanto, Heni. *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1, (2015): 8

<sup>52</sup> Pasal 33 UUDNRI dijabarkan sebagai berikut :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Dalam pengajuan pelaku korporasi ke pengadilan, biasanya hanya akan dikenakan pidana denda yang secara nyata kurang memberikan efek jera. Hal ini dikarenakan adanya kesulitan pembuktian “kesalahan” korporasi sebagai bagian unsur melawan hukum daripada membuktikan kesalahan perorangan. Kesalahan itu sendiri dalam arti luas, yaitu :<sup>53</sup>

1. Pelaku dapat dipertanggungjawabkan;
2. Adanya kaitan psikis antara pelaku dan perbuatan, yaitu adanya niat dalam kesengajaan atau kelalaian (culpa);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pelaku.

Teori ilmu pengetahuan hukum pidana menenal dua asas yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengecualikan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Namun, kedua asas tersebut tidak diatur dalam KUHP, yaitu asas “*strict liability*” dan asas “*vicarious liability*”. Asas *strict liability* menyebutkan bahwa meskipun seseorang dalam kenyatannya tidak melakukan tindak pidana, namun dalam rangka pertanggungjawaban pidana seseorang tersebut dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan tindak pidana. Sedangkan, asas “*vicarious liability*” menyebutkan bahwa perbuatannya telah dapat dipidana hanya karena telah terpenuhinya unsur-

---

<sup>53</sup> Alfansa, dan Theodora Yuni Shah Putri, *Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014): 5

unsur tindak pidana oleh perbuatannya, sedangkan kesalahan pembuat tidak lagi diperhatikan.<sup>54</sup>

Pada kasus korupsi Gardu Induk PLN yang dilakukan oleh PT Arya Sada Perkasa, pertanggungjawaban korporasi dalam hal membuktikan unsur perbuatan dan kesalahan memang cukup sulit. Namun, apabila terjadi dalam kasus korupsi dapat dinilai akan berhilir kemana uang yang diperoleh dari melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, apalagi jumlah yang diperoleh sangat tinggi dan mengakibatkan kerugian keuangan negara. Disini peran korporasi sebagai muara keuntungan dari pihak-pihak, seperti direksi, direktur dan lain sebagainya yang melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya korporasi. Karena korporasi tidak memiliki *mens rea* atau niat jahat, sehingga unsur kesalahan atau dengan kata lain asas tiada pidana tanpa kesalahan kembali diperhitungkan yang membuat korporasi dapat terhindar dari pertanggungjawaban pidana. Sehingga, ada asas pengecualian dari asas tiada pidana tanpa kesalahan yang membuat korporasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pada kasus korupsi Gardu Induk PLN, PT Arya Sada Perkasa sebagai korporasi menerima keuntungan dari perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Egon Chairul Arifin selaku direktur atau direksi sekaligus pemilik PT Arya Sada Perkasa serta Tanggul Priamandaru selaku manager dan kuasa dari PT Arya Sada Perkasa. Disini, korporasi dapat dinilai menguasai dan

---

<sup>54</sup> Ruba'i, Masruchin, Op.cit., 92-93

menggunakan dana yang dikorupsi untuk proses kegiatannya, sehingga doktrin *vicarious liability* ini sesuai dengan kasus korupsi Gardu Induk PLN yang dilakukan oleh PT Arya Sada Perkasa. Meskipun doktrin tersebut belum dimasukkan dalam KUHP, namun para pembuat undang-undang dan akademisi sudah mengisyaratkan akan memberlakukan doktrin ini dalam hukum pidana pada masa yang akan datang. Isyarat ini dapat dilihat pada Rancangan KUHP (RKUHP) tahun 2012 yang terdapat pada Pasal 38<sup>55</sup>.

### c. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Penempatan korporasi sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi sangat memungkinkan, mengingat kajian-kajian teoritis (doktrin) yang sangat mendukung untuk mempertanggungjawabkan dan mempidanakan korporasi. Teori-teori yang menjelaskan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan pertanggungjawaban korporasi, antara lain :<sup>56</sup>

#### 1. Teori Identifikasi

Tindakan dari pengurus atau pegawai sebagai personil suatu korporasi diidentifikasi sebagai tindakan korporasi.

Menurut Susanto yang dikutip dalam jurnal Yudi Krismen, yaitu teori ini didasarkan pada doktrin *Strict Liability* (tanggungjawab

---

<sup>55</sup> Pasal 38 RKUHP dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat menentukan bahwa seseorang dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya kesalahan;
- (2) Dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

<sup>56</sup> Krismen, Yudi. Op.cit. 157



langsung) yang menetapkan pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Namun, para pakar lain menempatkan teori atau doktrin identifikasi merupakan hal yang berbeda dengan doktrin *Strict Liability*. Perbuatan pengurus yang merupakan *directing mind* dari suatu suatu korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi, sehingga perbuatan pidana yang dilakukan pengurus bertanggungjawab, pidananya dapat.dibebankan kepada korporasi.

## 2. Teori Imputasi

Mendasarkan pada prinsip *Vicarious Liability* atau *Imputed Liability* atau tanggungjawab yang dialihkan kepada pihak lain oleh pelaku perbuatan karena adanya hubungan antara pihak yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku perbuatan.

Menurut teori imputasi, hubungan antara pengurus atau pegawai dengan pelaku perbuatan dengan korporasi, merupakan hal yang utama, dalam artian pegawai harus bertindak dalam ruang lingkup atau bagian.dari pekerjaan untuk kepentingan korporasi. Dengan demikian, korporasi bertanggungjawab terhadap maksud dan tindakan pegawainya.

Ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi agar suatu korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan agennya, sebagaimana yang



repository.ub.ac.id

diungkapkan oleh Sigid Soesono yang dikutip oleh Yudi Krismen, meliputi:<sup>57</sup>

1. Agen korporasi melakukan kejahatan;
2. Kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup kewenangannya;
3. Dengan tujuan untuk keuntungan korporasi.

Teori pertanggungjawaban pidana yang tepat bagi kasus korupsi Gardu Induk PLN yang dilakukan oleh PT Arya Sada Perkasa ialah teori imputasi. Pada teori ini, pihak direksi dan kuasa PT Arya Sada Perkasa yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan merugikan keuangan negara. Namun, perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan menguntungkan korporasi. Disini ada hubungan atau kaitan antara pelaku perbuatan dengan korporasi sebagai pihak yang diuntungkan. Dengan kata lain, PT Arya Sada Perkasa juga ikut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan kuasanya tersebut.

#### **d. Sistem Kedudukan Pertanggungjawaban Pidana**

Mencermati perkembangan cara-cara perumusan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ada 3 (tiga) sistem kedudukan korporasi sebagai pembuat dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sebagai berikut :<sup>58</sup>

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;

---

<sup>57</sup> Ibid., 157

<sup>58</sup> Setiyawan, Wahyu Beny Mukti, Op.cit., 5

- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggungjawab;
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan bertanggungjawab.

### 3. Penentuan Sistem Pidanaan Korporasi pada Uang Pengganti

Hukum pidana objektif berisi tentang berbagai macam perbuatan yang dilarang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidana kepada barang siapa yang melakukannya. Sanksi pidana yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, kemudian oleh negara dijatuhkan dan dijalankan kepada pelaku perbuatan. Hak dan kekuasaan negara yang demikian merupakan suatu kekuasaan yang sangat besar yang harus dicari dan diterangkan dasar-dasar pijakannya.<sup>59</sup>

Mengenai teori-teori pidanaan berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidanaan ini, dapat dikelompokkan ke dalam 3.(tiga) golongan besar, yaitu :<sup>60</sup>

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*);
2. Teori relatif atau teori tujuan (*doelk theorien*);
3. Teori gabungan (*verneging theorien*).

Teori absolut memberi pijakan utama pada unsur,pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Tindakan pembalasan dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu

---

<sup>59</sup> Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Edisi 8 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 155

<sup>60</sup> Ibid.,157

ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan), dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Bila seseorang melakukan kejahatan pada kepentingan hukum yang terlanggar. Akibat yang timbul tiada lain berupa suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat pada umumnya. Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, antara lain :<sup>61</sup>

1. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan

Suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia. Oleh karena itu, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya;

2. Pandangan dari Sudut Etika

Tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana sebagai, suatu yang dituntut oleh keadilan etis merupakan syarat etika;

3. Pandangan Alam Pikiran Dialektika

---

<sup>61</sup> Ibid., 159-161

Pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum;

4. Pandangan Aesthetica dari Herbart

Berpangkal pada apabila kejahatan tidak dibalas, maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana setimpal pada pelaku. Setimpal artinya pidana harus dirasakan sebagai penderitaan yang sama berat atau besarnya dengan penderitaan korban atau masyarakat yang diakibatkan oleh kejahatan tersebut;

5. Pandangan dari Heymans

Setiap niat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dapat dan layak diberikan kepuasan, tetapi niat yang bertentangan dengan kesusilaan tidak perlu diberikan kepuasan. Tidak diberi kepuasan ini berupa penderitaan yang adil;

6. Pandangan dari Kranenburg

Teori ini didasarkan pada asas keseimbangan. Apabila seseorang berbuat kejahatan yang berarti membuat suatu penderitaan istimewa bagi orang lain, maka sudahlah seimbang bahwa penjahat itu diberi penderitaan istimewa yang besarnya sama dengan besarnya penderitaan yang telah dilakukannya terhadap orang lain tersebut.

Teori-relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah jalan untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana memiliki 3 (tiga) macam sifat, yaitu :<sup>62</sup>

1. Bersifat menakut-nakuti (*afshrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sementara itu, sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, sebagai berikut :

1. Teori Pencegahan Umum (*general preventie*)

Titik berat pada pencegahan umum, yaitu pada pelaksanaan pidana yang menakutkan orang. Agar khalayak umum menjadi takut untuk melakukan kejahatan dari melihat penjahat yang dipidana, eksekusi pidana haruslah bersifat kejam. Agar pelaksanaan pidana itu diketahui oleh semua orang, eksekusi harus dilakukan di muka umum secara terbuka;

2. Teori Pencegahan Khusus (*speciale preventie*)

Pada teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulangi lagi melakukan kejahatan dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya dalam bentuk perbuatan nyata.

---

<sup>62</sup> Ibid.,

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, meliputi :<sup>63</sup>

1. Teori gabungan yang pertama dengan mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak dapat melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
2. Teori gabungan yang kedua dengan mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Apabila dilihat secara global, tujuan pemidanaan korporasi menyangkut tujuan yang bersifat integratif yang mencakup, antara lain :<sup>64</sup>

- 1) Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus)

Tujuan pencegahan umum adalah agar orang lain tidak melakukan kejahatan tersebut, sedangkan tujuan pencegahan khusus adalah untuk mendidik dan memperbaiki penjahat atau pelakunya. Jadi apabila dihubungkan dengan korporasi, maka tujuan dipidananya korporasi agar korporasi tersebut tidak melakukan kejahatan kembali, dan korporasi-korporasi lain tercegah untuk melakukan

---

<sup>63</sup> Ibid., 166-167

<sup>64</sup> Kristian, Op.cit., 587-588

tindak pidana, dengan tujuan secara luas demi pengayoman masyarakat;

2) Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat

Perlindungan masyarakat sebagai tujuan pemidanaan mempunyai dimensi yang sangat luas, karena secara fundamental merupakan tujuan semua pemidanaan. Secara sempit, hal ini digambarkan sebagai bahan kebijaksanaan pengadilan untuk mencari jalan melalui tindak pidana. Perlindungan masyarakat sering dikatakan berada di seberang pencegahan dan mencakup apa yang dinamakan tidak mampu. Bila dikaitkan dengan korporasi, sehingga korporasi tidak mampu lagi melakukan tindak pidana;

3) Tujuan pemidanaan adalah memelihara solidaritas masyarakat

Pemeliharaan solidaritas masyarakat dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan adalah untuk penegakan adat istiadat masyarakat, dan untuk mencegah balas dendam perseorangan, atau balas dendam yang tidak resmi. Pengertian solidaritas ini juga sering dihubungkan dengan masalah kompensasi terhadap korban dilakukan oleh korporasi itu sendiri yang diambil dari kekayaan korporasi, sehingga solidaritas sosial dapat dipelihara;

4) Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan atau keseimbangan

Adanya kesebandingan antara pidana dengan pertanggungjawaban individual dari pelaku tindak pidana dengan memperhatikan beberapa faktor. Penderitaan yang dikaitkan oleh pidana harus



menyumbang pada proses penyesuaian kembali terpidana pada kehidupan masyarakat sehari-hari dan disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan apapun.

Formulasi aturan ppidanaan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah diatur sedemikian rupa dalam UU Tipikor nyatanya masih memiliki kelemahan. Disamping ppidanaan korporasi melalui UU Tipikor, hukum acara pidana yang mengatur korporasi baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pada eksekusi putusan diatur oleh beberapa aturan, salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (atau disebut dengan Perma Tindak Pidana oleh Korporasi). Keberadaan peraturan tersebut memiliki fungsi sebagai pengisi teknis kekosongan hukum terhadap kelemahan teknis acara penanganan tindak pidana korporasi dalam UU Tipikor. Namun, setelah dibahas lebih lanjut mengenai ppidanaan korporasi dalam Perma Tindak Pidana oleh Korporasi, masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mengakibatkan kurang sesuainya ppidanaan korporasi menurut peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pada Perma Tindak Pidana oleh Korporasi, pembayaran uang pengganti pada mulanya juga diatur lebih lanjut pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (atau disebut dengan Perma Uang Pengganti) untuk menjelaskan pembayaran uang

pengganti secara lebih rinci. Namun, pada perma ini lebih menekankan pada subjek perorangan dalam pembayaran uang pengganti, sehingga apabila subjeknya adalah korporasi maka merujuk pada Perma Tindak Pidana oleh Korporasi.

Pada UU Tipikor, pemidanaan korporasi perihal pembebanan pidana tambahan dalam bentuk uang pengganti dengan tujuan mengembalikan kerugian keuangan negara tidak dapat diupayakan dengan seefektif mungkin. Adanya Perma baik Perma Uang Pengganti dan Perma Tindak Pidana oleh Korporasi diharapkan dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai pembayaran uang pengganti. Terwujudnya Perma tersebut memberikan peluang penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi dan pengenaan pembebanan kewajiban membayar uang pengganti. Namun, setelah adanya kasus, seperti PT Arya Sada Perkasa yang tidak mampu bertanggungjawab membayar uang pengganti hingga direkturnya bebas dari hukuman, penegak hukum masih belum memproses baik melakukan penyitaan harta benda yang terkait dengan korupsi di perusahaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, baik Perma Uang Pengganti maupun Perma Tindak Pidana oleh Korporasi tidak mengatur mengenai norma hukum yang seharusnya memberikan pengaturan yang benar-benar mengikat dan memberikan efek jera. Pada perma-perma tersebut hanya menjelaskan secara teknis pembayaran uang pengganti.

Pada putusan yang telah *inkracht*, Hakim hanya memberikan pembebanan kewajiban uang pengganti pada korporasi tanpa tindakan lain

terhadap korporasi tersebut. Tindakan ini diharapkan untuk mencegah aset atau harta kekayaan korporasi berpindah, dan mencegah uang yang dikorupsi masih beroperasi lebih jauh dalam perusahaan tersebut. Karena Jaksa dalam melakukan tugasnya nanti apabila terjadi penyitaan aset atau tindakan lainnya yang berhubungan dengan pembayaran uang pengganti akan terhambat, jika aset pada korporasi telah menyebar semakin jauh.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Uang pengganti merupakan konsekuensi dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Penjatuhan pembayaran uang pengganti harus dilihat dari arah tujuannya, yaitu melalui *follow the suspect* dan *follow the money*. Uang pengganti dapat dibayarkan melalui dua instrumen hukum, yaitu mekanisme pidana dan perdata karena bahwa norma-norma hukum pidana saja tidak cukup memadai untuk pengembalian kerugian keuangan negara. Meskipun peraturan perundang-undangan dinilai telah lugas menjelaskan mengenai konsekuensi dan pemidanaan korporasi yang tidak membayar uang pengganti, namun korporasi masih tidak mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan kewajibannya tersebut karena lemahnya kekuatan UU Tipikor, Perma Uang Pengganti, dan Perma Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan perundang-undangan tersebut hanya mengatur secara teknis saja.
2. Perbuatan secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara untuk memperkaya atau menguntungkan korporasi dilakukan oleh pengurus korporasi. Pemidanaan korporasi dengan membayar uang pengganti saja tidak cukup untuk memulihkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Hal ini membuat korporasi tidak mendapatkan efek jera dari akibat perbuatan korupsi yang telah dilakukan,

karena pembayaran uang pengganti tidak dapat membuat ekonomi korporasi terhambat atau dengan kata lain tidak dapat memiskinkan korporasi. Dibuktikan dengan tidak adanya penangguhan terhadap korporasi dan konsekuensi lebih lanjut untuk korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana korupsi yang berakibat merugikan keuangan negara.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran terkait dengan pemidanaan korporasi terhadap ketidakmampuan membayar uang pengganti tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

1. Melakukan pengkajian kembali pada Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi dan Perma Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, khususnya mengenai pembayaran uang pengganti oleh korporasi untuk diuraikan secara lebih lanjut. Karena konsekuensi dari pembayaran uang pengganti dalam peraturan perundang-undangan tersebut dinilai masih dijelaskan secara teknis dan belum adanya penangguhan atau pemidanaan lebih lanjut terhadap korporasi yang menikmati kekayaan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pengurusnya.
2. Pembayaran uang pengganti dapat dilakukan dengan penuh dan seksama oleh korporasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan tidak hanya bersifat secara teknis. Ditambahkan dengan penangguhan korporasi agar tidak mengulangi perbuatan korupsi serta selalu

memonitor adanya pengembalian kerugian keuangan negara secara utuh dan efektif. Hal ini juga sebagai bentuk tujuan memperbaiki sektor perekonomian Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002
- Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Edisi 8. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika: Jakarta, 2010
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005
- Fajar, Mukti. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007
- Makawimbang, Hernold Ferry. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang* Yogyakarta: Thafa Media, 2015
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011
- Muladi dan Dwidja Priyatno. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Kencana, 2015
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan: Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2010
- Ruba'i, Masruchin. *Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia Publishing, 2014



- Sjawie, Hasbullah. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kencana, 2015
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Suyatno, *Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Tim Riset G-20. *Peran Indonesia dalam G-20: Latarbelakang, Peran dan Tujuan Keanggotaan Indonesia*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung, 2011
- Wijayanto dan Ridwan Zachrie. *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009
- Yuntho, Emerson. *Penerapan Unsur Merugikan Keuangan Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch, 2014

## JURNAL ILMIAH

- Alfanisa, dan Theodora Yuni Shah Putri, *Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidananya*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2014)
- Damanik, Kristwan Genova, *Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No 1, Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Maluku Utara, (2016)
- Fines Fatimah dan Barda Nawawi Arief. *Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di Indonesia, Law Refrom*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, (2012)
- Ginangjar, Mohamad. *Eksekusi Uang Pengganti Terhadap Terpidana dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 18, Nomor. 2, Kejaksaan Tinggi Aceh, Banda Aceh, (2016)
- Gultom, Liwijaya Lestari. *Pemidaan Terhadap Korporasi Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, (2015)

- Ibrahim, Johnny. *Eksistensi Badan Hukum di Indonesia Sebagai Wadah dalam Menunjang Kehidupan Manusia*, *Law Review*, Volume 11, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Surabaya (2011)
- Krismen, Yudi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 No 1, Pekanbaru, (2015)
- Kristian, *Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 44 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (2013)
- Kusumo, Bambang Ali. *Tindak Pidana Korporasi dan Upaya Penanggulangannya*, *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, (2005)
- Lukas, Ade Paul. *Efektivitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Purwokerto, (2010)
- Muliadi, Saleh. *Aspek Kriminologis dalam Penanggulangan Kejahatan, Fiat Justicia* *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6 No 1, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Palu, (2012)
- Musahib, Abdul Razak. *Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, *E-Journal*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, (2015)
- Permana, Wahyu Priyanka Nata. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS) : Sinkronisasi Penanganan Perkara Pidana yang Dilakukan oleh Subjek Hukum Korporasi*, Volume II Nomor 1, Mei 2017, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (2017)
- Rambey, Guntur. *Pengembalian Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda*, *De Lega Lata*, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, (2016)
- Rohrohmana, Basir. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Volume 6 No 1, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Jayapura, (2017)
- Salmi, Akhiar. *Pidana Pembayaran Uang Pengganti: Dulu Kini dan Masa Datang*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Edisi Khusus*, Universitas Indonesia, (2009)
- Setiyawan, Wahyu Beny Mukti. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, *E-Journal* Universitas Surakarta, Volume 8 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Surakarta: Surakarta, (2014)

- Siswanto, Heni. *Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1, (2015)
- Sultan. *Analisis Yuridis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi*, *Hasanuddin University*, Volume 5 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, (2016)
- Surya Sofyan Hadi dan Suhaidi dkk. *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Kebakaran Hutan dalam Kaitannya dengan Penerapan Hukum Lingkungan*, *USU Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, (2016)
- Yamin, Fuad Akbar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Uang Pengganti untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, *Hasanuddin University*, Volume 10 Nomor 7, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2013)
- Yazid, Ferdian. *Upaya Pencegahan Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Tinjauan dari Aspek Social Crime Prevention)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 44 Nomor 4, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, (2014)

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi

**INTERNET**

- Ainur, Rahman. *Lima Orang Kembali Ditetapkan Tersangka Korupsi Pembangunan Gardu Induk PLN*. <http://www.gresnews.com/berita/hukum/91223-lima-orang-kembali-ditetapkan-tersangka-korupsi-pembangunan-gardu-induk-pln/> (Diakses pada 31 Mei 2018)
- Anonim, *KPK : Perma Nomor 13 Membuat Korporasi Bisa Dipidana*. <https://www.liputan6.com/news/read/2822573/kpk-perma-nomor-13-membuat-korporasi-bisa-dipidana> (diakses pada 28 Mei 2018)
- \_\_\_\_\_, *PLN Diminta Cairkan Uang Pengganti Kerugian Negara oleh BPI KPNPA Jabar*. <https://m.harianterbit.com/welcome/read/2017/10/28/88813/43/25/PLN-Diminta-Cairkan-Uang-Pengganti-Kerugian-Negara-oleh-BPI-KPNPA-Jabar-> (Diakses pada 9 Februari 2018)
- Budi, Setiawan. *Tak Kunjung Bayar Uang Pengganti, PT Aryasa Dilaporkan ke Komisi III DPR-RI*. <https://amunisineews.co.id/tak-kunjung-bayar-uang-pengganti-pt-aryasa-dilaporkan-ke-momisi-iii-dpr-ri/> (Diakses pada 22 Maret 2018)
- Ismanto, *BPI KPNPA Jabar Minta PLN Cairkan Dana PT Aryasada untuk Uang Pengganti Kerugian Negara*. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/26/lsm-bpi-knpa-jabar-minta-pln-cairkan-dana-pt-aryasada-untuk-uang-pengganti-kerugian-negara> (Diakses pada 9 Februari 2018)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/maksimum> (Diakses pada 24 April 2018)
- Taufik Rachman, *Artidjo Usulkan Perma Mengenai Uang Pengganti Kasus Korupsi*. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/07/02/mpb0gp-artidjo-usulkan-perma-mengenai-uang-pengganti-kasus-korupsi> (Diakses pada 24 April 2018)